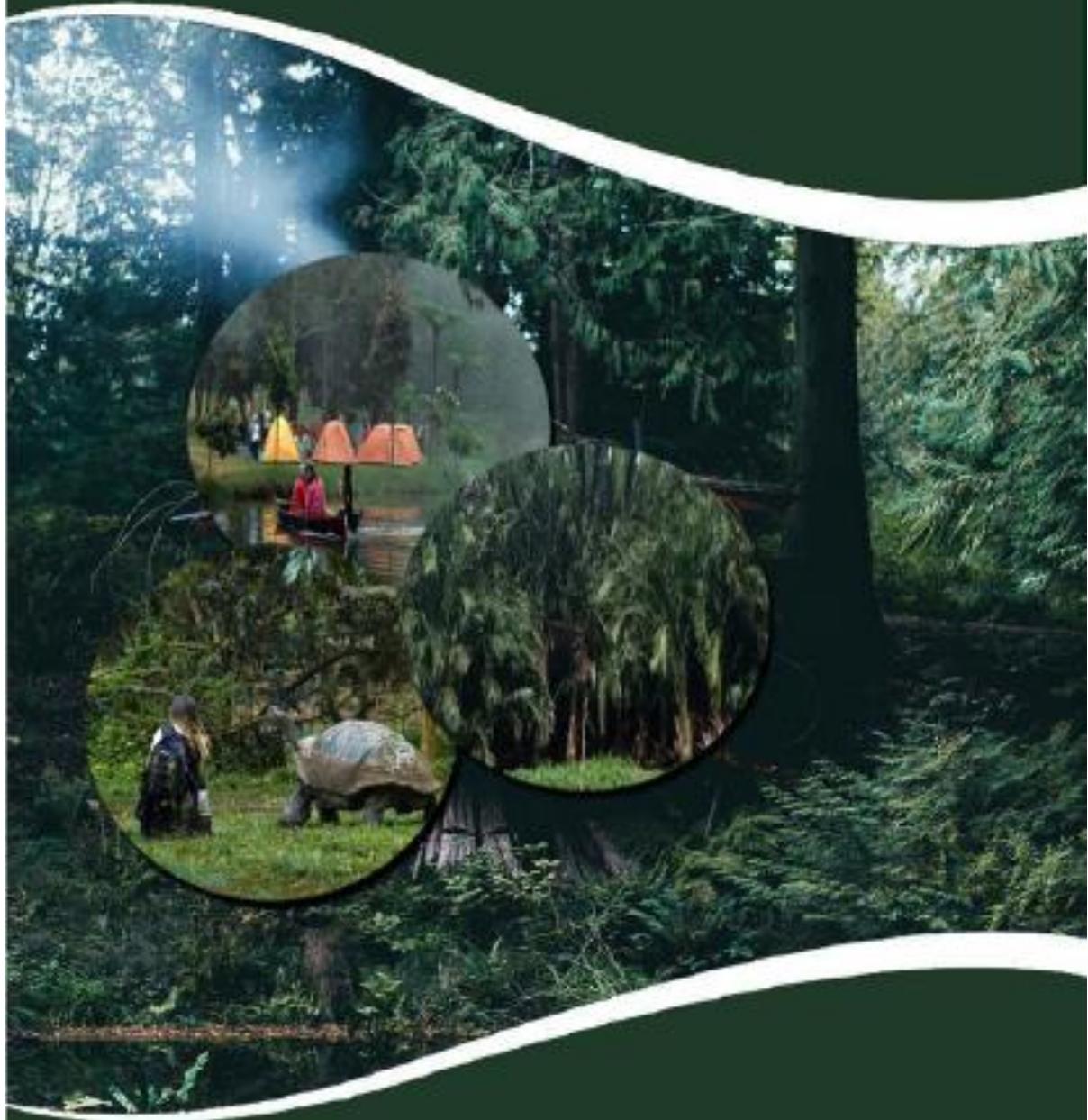


BUKU AJAR

EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN



Kissinger | M. Arief Soendjotoe - Abdi Fithria - Khairun Nisa
Editor : Rina Muhayah NP

BUKU AJAR
**EKOWISATA
DAN JASA LINGKUNGAN**

Penulisan buku ini ditujukan sebagai bahan referensi utama bagi mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru untuk capaian Pembelajaran Mata Kuliah Ekowisata dan Jasa Lingkungan. Buku ajar ini berisikan tentang tentang Pengantar tentang Pariwisata Berkelanjutan, materi Ekowisata dalam Tatanan Konsep dan Implementasi, Ekowisata Berbasis Masyarakat dan Penentuan Status Kawasan Hutan, Jasa Lingkungan dan Imbal Jasa Lingkungan, serta Lahan Basah Sebagai Penyedia Jasa Lingkungan, Ekowisata dan Sumber Pangan.

PENERBIT :

CV Banyubening Cipta Sejahtera
Cibakaya, Jl. Sapi Marga Blok E No. 38 RT 007 RW 003
Caming Payang, Landasan Ulin, Banjarbaru 70721
Telp/WA: 0818-0936-2734
E-mail: banyubeningca@gmail.com

ISBN 978-623-0731-19-0



BUKU AJAR: EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN

**Kissinger
M. Arief Soendjotoe
Abdi Fithria
Khairun Nisa**



BUKU AJAR: EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN

Penulis:

Kissinger

M. Arief Soendjotoe

Abdi Fithria

Khairun Nisa

Editor : Rina Muhayah NP

Desain Cover: Basuki Rahmat

Ukuran :

viii, 127 hlm, 15.5x23 cm

ISBN : 9786235774190

Cetakan Pertama :

November 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang pada Penulis
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

CV Banyubening Cipta Sejahtera

Alamat:

Gubukayu

Jl. Sapta Marga Blok E No. 38 RT 007 RW 003

Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru 70721

Telp/WA: 0818-0936-2734

E-mail: banyubeningcs@gmail.com

PRAKATA

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah yang telah mencurahkan kebesaran dan rahmat Nya, yang menjadi sebab bagi penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar Ekowisata dan Jasa Lingkungan. Penulisan buku ini ditujukan sebagai bahan referensi utama bagi mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Ekowisata dan Jasa Lingkungan. di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Ekowisata dan Jasa Lingkungan yang diuraikan dalam buku ini terdiri dari: i) Menerapkan keilmuan dasar kehutanan dan menghubungkannya dalam pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan hujan tropis lestari dalam bentuk jasa lingkungan pariwisata berkelanjutan; ii) Menerapkan konsep dan standar jasa lingkungan ekowisata dalam Pengelolaan Hutan Hujan Tropis Basah yang Berkelanjutan; iii) Kemampuan mengolah, menganalisis dan menentukan keputusan yang tepat dalam perencanaan kegiatan ekowisata & jasa lingkungan iv) kemampuan manajerial yang baik secara professional, bertanggungjawab dalam kegiatan ekowisata dan jasa lingkungan dalam mewujudkan pengelolaan hutan tropis basah lestari.

Bab awal dari buku ajar ini mengemukakan tentang Pengantar tentang Pariwisata Berkelanjutan. Bagian kedua berisikan materi Ekowisata dalam Tatanan Konsep dan Implementasi. Bab 3 mengulas materi tentang Ekowisata Berbasis Masyarakat. Penentuan Status Kawasan Hutan diungkapkan dalam Bab 3. Membangun Desa Wisata menjadi pokok pembahasan dalam Bab 4. Bagian ke lima memuat materi tentang Jasa Lingkungan dan Imbal Jasa Lingkungan. Bab 6 berisikan materi Lahan Basah Sebagai Penyedia Jasa Lingkungan, Ekowisata dan Sumber Pangan

Penulisa pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tulisan ini. Semoga buku ajar ini bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkannya sebagai referensi. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kehutanan dan bidang ilmu lainnya.

Banjarbaru, November 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I Pariwisata Berkelanjutan.....	1
1.1. Kepariwisataaan.....	2
1.2. Wisata berkelanjutan.....	8
1.3. Simpulan.....	19
BAB II Ekowisata dalam Tatanan Konsep dan Implementasi	20
2.1 Konsep, Nilai Penting dan Implementasi Ekowisata.....	20
2.2 Pendekatan Pengelolaan Ekowisata	28
2.3. Pengembangan Ekowisata.....	34
2.5. Simpulan.....	39
BAB III Ekowisata Berbasis Masyarakat.....	40
3.1. Konsep Ekowisata Berbasis Masyarakat	40
3.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Ekowisata	43
3.3. Partisipasi Masyarakat dalam Ekowisata.....	45
3.3. Simpulan.....	60
BAB IV. Jasa Lingkungan dan Imbal Jasa Lingkungan.....	71
4.1. Prinsip Pelaksanaan Imbal Jasa Lingkungan.....	71
4.2. Para Pihak dalam Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan.....	81
4.3. Penetapan Nilai Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan	86
4.4. Beberapa Landasan Hukum tentang Imbal Jasa Lingkungan.....	90
4.5. Skema Penerapan Imbal Jasa Lingkungan.....	92
4.5. Simpulan.....	103
BAB V. Lahan Basah Sebagai Penyedia Jasa Lingkungan dan Ekowisata.....	104
5.1. Sumberdaya lahan basah sebagai penyedia jasa lingkungan.....	104
5.2. <i>Metroxylon sagu</i> di lahan basah Kalimantan Selatan.....	106
5.3. Simpulan.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119

I. PARIWISATA BERKELANJUTAN

Tujuan Pembelajaran Mata Kuliah:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pariwisata dan perannya dalam mendorong pembangunan bidang ekonomi, sosial dan konservasi
2. Mahasiswa mampu menganalisis komponen-komponen utama pariwisata berkelanjutan sebagai bentuk jasa lingkungan
3. Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan ekologi, ekonomi dan sosial dalam membangun kepariwisataan berkelanjutan

I.1 Kepariwisataan

Sektor pariwisata menurut *United Nation World Tourism Organizations* (UNWTO) adalah sektor unggulan (*tourism is a leading sector*) yang menjadi salah satu kunci penting untuk pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat (UNWTO. 2013),



Gambar 1.1 Berbagai tujuan wisata di Indonesia

Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP dunia sebesar 9%, 1 dari 11 pekerjaan diciptakan oleh sektor pariwisata, kontribusi terhadap nilai ekspor dunia sebesar USD 1,4 triliun atau setara dengan 5% ekspor yang terjadi di dunia.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki efek berganda (multiplier effect) terbesar dalam perekonomian. Sektor pariwisata ditopang oleh beragam

subsektor mulai dari transportasi, akomodasi, hingga industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Pembangunan pariwisata di Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia menjadi aliran pemasukan devisa.

Pengembangan pariwisata juga dapat mempertahankan proses ekologis dan membantu melestarikan warisan alam dan buatan manusia serta keragaman hayati (Kagungan dan Yulianti. 2019). Pariwisata harus dikelola dengan serius yang melibatkan berbagai *stakeholder* terkait karena pembangunan dan pengembangan pariwisata merupakan hasil keberlanjutan jangka panjang dengan perencanaan dan dukungan dari semua pihak.

Tercatat sumbangan pariwisata terhadap devisa negara pada kuartal 1 tahun 2019 mencapai Rp 280 triliun. Ekonomi sektor pariwisata berkontribusi pada Pendapatan Distribusi Bruto (PDB) nasional sebesar 4,7 %. Jumlah tenaga kerja sektor ini sebanyak 13 juta orang. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB pada 2020 menurun sekitar angka 4,1 persen sebagai dampak dari Pandemi Covid 19. Berdasarkan data BPS (2021), terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke

Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,02 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03 persen

Proyeksi penerimaan devisa dari pariwisata pada tahun 2020 antara 4-7 miliar dolar AS. Sebelum terjadi pandemi, penerimaan devisa pariwisata tahun 2020 ditargetkan sebesar US\$ 19-21 miliar. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, penurunan yang terjadi cukup signifikan karena penerimaan devisa pariwisata pada tahun sebelumnya hampir mencapai 20 miliar dolar AS



Gambar 1.2 Trend penurunan kunjungan wisatawan mancanegara akibat pandemic Covid 19

Menyikapi fenomena tersebut pemerintah menargetkansumbangan ekonomi pariwisata 5-10 tahun ke depan kontribusinya dapat mencapai 10-12 persen dari PDB. Wisata Virtual (*Virtual Tourism*) menjadi salah satu alternatif yang muncul di tengah kejemuan pandemi COVID-19. Wisata Virtual hadir sebagai salah satu bentuk transformasi dan adaptasi melawan pandemi dengan memanfaatkan teknologi,

sembari menunggu proses *recovery* dunia pariwisata yang belum signifikan

Pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi wisata. Pariwisata bila dikelola dengan benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Kesejahteraan yang didapat dari pariwisata tidak sekedar material, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritual, kultural dan intelektual. Pariwisata mempunyai potensi dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antar bangsa. Prospek strategis ini menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Indonesia memiliki 17.000 pulau yang tersebar membentang dari Barat ke Timur. Pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara terarah dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.



Gambar 1.3 Wisata menciptakan keharmonisan hubungan antar manusia dan antar bangsa

Beberapa istilah penting ini dikutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Beberapa istilah penting tersebut di antaranya adalah:

- 1) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha
- 2) Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata,

Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat

- 3) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam (wisata alam), budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 4) Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
- 5) Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya
- 6) Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

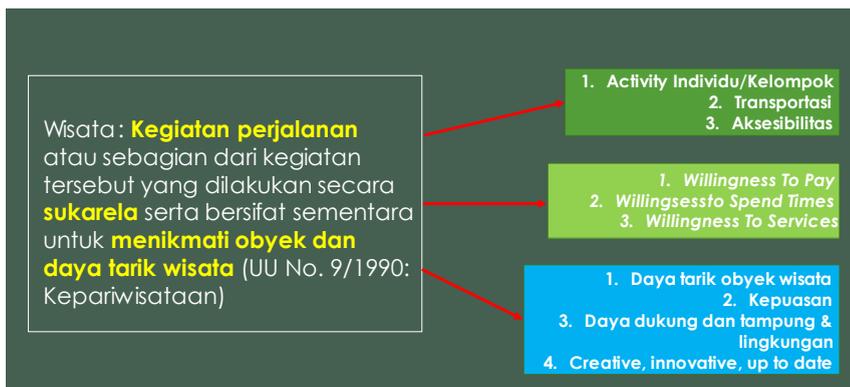
- 7) Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata
- 8) Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
- 9) Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya
- 10) Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara

berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata

- 11) Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
- 12) Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
- 13) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 14) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata

Membangun wisata sebagai bagian dari program kepariwisataan harus didahului oleh pemahaman terhadap wisata itu sendiri. Wisata didefinisikan sebagai *kegiatan perjalanan* atau sebagian dari kegiatan tersebut yang *dilakukan secara sukarela* serta bersifat sementara untuk *menikmati obyek dan daya tarik wisata* (UU No. 9/1990: Kepariwisata). Terdapat 3 kata kunci dalam pengertian ekowisata (cetak miring).

Kegiatan perjalanan mencakup pemahaman tentang aktifitas individu/kelompok, transportasi dan aksesibilitas. Ketiga komponen tersebut harus difasilitasi agar tercipta kegiatan perjalanan yang kondusif. Kata kunci berikutnya adalah kegiatan dilakukan secara sukarela. Hal ini berkenaan dengan kesediaan membayar, kesediaan untuk menyisihkan waktu bagi wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata. Kesediaan wisatawan tersebut harus difasilitasi dengan kesediaan melayani dari pengelola dan masyarakat daerah destinasi wisata. Kata kunci berikutnya adalah menikmati obyek dan daya tarik wisata. Hal ini berkenaan dengan daya tarik obyek wisata, kepuasan, daya dukung dan tampung dan lingkungan, *creative, innovative, up to date*.



Gambar 1.4. Konsep wisata dan kata kunci dalam pengembangan wisata

Komponen pariwisata perlu diketahui dan dianalisis dalam upaya pengembangan pariwisata. Menurut Buhalis (2000) dalam Anggraini (2017) terdapat komponen utama yang

dikarakteristikan sebagai enam kerangka A, yaitu Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, *Available Packages* (Paket wisata yang tersedia), Aktivitas, dan *Ancillary Services* (Layanan tambahan).

1. Komponen **atraksi** dapat dianggap sebagai salah satu komponen dasar pariwisata yang sangat penting karena merupakan tujuan utama wisatawan untuk melakukan perjalanan ke destinasi wisata tertentu. Atraksi merupakan daya tarik wisata yang telah disiapkan untuk dinikmati oleh wisatawan.



Gambar 1.5. Contoh atraksi wisata

2. Komponen **aksesibilitas** atau kemampuan untuk mencapai tempat tujuan melalui berbagai sarana transportasi. Kegiatan kepariwisataan tergantung kepada aksesibilitas karena salah satu faktor yang mempengaruhi wisatawan melakukan perjalanan wisata adalah masalah jarak tempuh dan waktu. Aksesibilitas ini berkaitan

dengan transportasi dan prasarana transportasi. Transportasi yang baik dapat mengakibatkan jarak seakan-akan menjadi dekat dan sementara prasarana transportasi ini menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Suatu destinasi wisata yang tidak memiliki aksesibilitas yang baik akan menyebabkan terhalangnya wisatawan menuju tempat wisata tersebut sehingga tidak dapat berkembang dengan baik.



Gambar 1.6. Aksesibilitas yang baik mempengaruhi perkembangan pariwisata

3. Komponen **Amenitas** adalah fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di kawasan pariwisata. Amenitas ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan di suatu destinasi wisata. Hal-hal yang termasuk dalam amenitas adalah

kebutuhan akomodasi, fasilitas hiburan dan layanan *catering/jasa boga*.



Gambar 1.7. Contoh fasilitas pendukung wisata yang menciptakan kenyamanan wisatawan

4. Komponen *available packages* (paket wisata) merupakan paket yang menggabungkan beberapa atraksi atau even dalam satu kurun waktu, dan dibuat oleh perantara atau pelaku utama. Biasanya paket wisata memudahkan wisatawan untuk merasakan dan mengalami berbagai atraksi dalam satu kesatuan waktu. Paket wisata merupakan bentuk integrasi antara kawasan wisata. Perkembangan teknologi terbaru dalam sajian informasi paket wisata dapat berbentuk pelayanan informasi digital (*digital platform*). Penggunaan digital platform ini mengajarkan kita untuk bisa bertutur dengan lebih komprehensif dan detil, sehingga informasi yang disampaikan dapat

lebih luas jangkauannya sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung.



Gambar 1.8. Contoh paket wisata yang ditawarkan

5. Komponen **Aktivitas** diartikan sebagai tindakan dan perilaku orang-orang saat persiapan dan perjalanan dalam kapasitasnya sebagai konsumen (UNWTO, 2008). Aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan wisatawan di destinasi tujuan selama kunjungan. Salah satunya dengan mengikuti even (acara) yang diselenggarakan, seperti upacara, festival, pameran.

Even merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, karena memberikan pengalaman yang unik dan berbeda dari tempat asalnya.



Gambar 1.9. Even Festival Dayak Meratus

6. Komponen *ancillary services* (layanan tambahan) adalah layanan pendukung yang akan digunakan wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, surat menyurat, rumah sakit, berita. Layanan tambahan sangat penting untuk kenyamanan wisatawan. Tujuan wisata yang terpencil tidak membatasi hubungan ke luar, keterjaminan keamanan dan Kesehatan.

Lima komponen wisata yang telah diuraikan secara tabulasi dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 1.1. Komponen penting dalam pariwisata

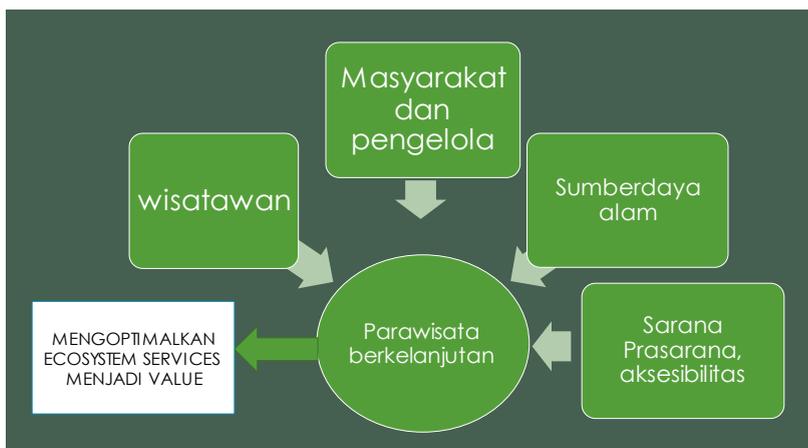
<i>Atribut</i>	<i>Contoh</i>
<i>Attractions</i>	Natural, buatan manusia, artificial, dibuat dengan tujuan, warisan budaya, event special
<i>Accessability</i>	Seluruh sistem transportasi yang termasuk pada rute, terminal, dan kendaraan
<i>Amenities</i>	Akomodasi dan fasilitas catering, dan layanan pariwisata lainnya
<i>Available Packages</i>	Paket Wisata yang dibuat oleh perantara atau pelaku utama
<i>Activities</i>	Aktifitas yang tersedia di destinasi dan apa yang wisatawan dapat lakukan selama kunjungan
<i>Ancillary Services</i>	Layanan pendukung yang akan digunakan wisatawan seperti bank, telekomunikasi, surat menyurat, berita, rumah sakit.

1.2 Wisata Berkelanjutan

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan memiliki dampak yang sangat luas dan signifikan bagi perkembangan perekonomian, upaya-upaya pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, serta berdampak kepada kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Pariwisata berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang tetap memperhatikan kelestarian, memberi peluang bagi generasi muda untuk memanfaatkan dan mengembangkannya berdasarkan tatanan sosial yang telah ada.

Pariwisata berkelanjutan pada dasarnya bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan. Empat komponen penting yang menjadi fokus pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah masyarakat lokal dan atau

pengelola, wisatawan, sumberdaya alam, dan sarana prasarana serta aksesibilitas.



Gambar 1.10. Komponen penting dalam kepariwisataan berkelanjutan

Hadiwijoyo (2012) menerangkan bahwa pariwisata berkelanjutan tersebut lebih dilandasi oleh upaya pemberdayaan (*empowerment*) baik dalam batasan sosial, ekonomi, maupun kultural. Pariwisata berkelanjutan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam usaha kepariwisataan dengan menggerakkan roda pariwisata daerah sertamenikmati manfaat pariwisata yang lebih besar.

Parisiwisata berkelajutan menekankan pada dampak positif yang dapat diterima masyarakat dan kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Konsep pariwisata berkelanjutan menekankan optimalisasi manfaat pembangunan kepariwisataan sebagai upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar destinasi pariwisata (Sunaryo 2013).

Strategi perencanaan pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. Strategi tersebut dikenal dengan istilah *Community-Based Tourism Development* (CBT). pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu “kegiatan yang berbasis komunitas”, dengan pengarusutamaan bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik yang melekat pada komunitas tersebut harus merupakan unsur penggerak utama dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Aspek ekonomi, ekologi dan sosial menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan

Dimensi	Wisatawan	Penyedia Jasa
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kepuasan wisata. - Peningkatan ketertarikan wisata di daerah destinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dan pemerataan pendapatan semua pelaku wisata. - Peningkatan kesempatan kerja terutama bagi masyarakat lokal. - Peningkatan kesempatan berusaha/awakaloka jawa-jawa
Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan produk dan layanan wisata berbasis lingkungan. - Keadilan membayar lebih mahal untuk produk dan layanan wisata ramah lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepedulian dan konsistensi pada daya dukung lingkungan. - Pengelolaan limbah dan pengurangan penggunaan bahan baku beracun. - Prioritas pengembangan produk dan layanan jasa berbasis lingkungan. - Peningkatan kesadaran lingkungan dengan kebutuhan konservasi. - Partisipasi sebanyak mungkin stakeholder dalam perencanaan, implementasi dan monitoring. - Peningkatan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola jasa-jasa wisata. - Pemberdayaan lembaga-lembaga lokal dalam perencanaan, pelaksanaan pengembangan pariwisata. - Berwujudnya pola masyarakat lokal berkeadilan masyarakat satu. - Terjalinnya hak-hak dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pariwisata Berwujudnya aturan main yang adil dalam perusahaan jasa wisata.
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kepedulian sosial. - Peningkatan konsumsi produk lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola jasa-jasa wisata. - Pemberdayaan lembaga-lembaga lokal dalam perencanaan, pelaksanaan pengembangan pariwisata. - Berwujudnya pola masyarakat lokal berkeadilan masyarakat satu. - Terjalinnya hak-hak dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pariwisata Berwujudnya aturan main yang adil dalam perusahaan jasa wisata.

• Dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pariwisata berkelanjutan

Gambar 1.11. Dimensi ekologi, ekonomi dan sosial pengembangan pariwisata berkelanjutan

I.3 SIMPULAN

Pariwisata berkelanjutan berperan mendorong pembangunan bidang ekonomi, sosial dan konservasi. Pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemanfaatan jasa lingkungan. Terdapat paling sedikit 6 komponen utama yang harus dipenuhi dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Komponen tersebut dikenal dengan Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, *Available Packages* (Paket wisata yang tersedia), Aktivitas, dan *Ancillary Services* (Layanan tambahan). Dimensi ekonomi, ekologi dan sosial menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan

Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian pariwisata dan perannya dalam mendorong pembangunan bidang ekonomi, sosial dan konservasi
2. Bagaimana metode analisis dalam menentukan penerapan pariwisata berkelanjutan. Komponen apa saja yang harus dinilai
3. Bagaimana penerapan pendekatan ekologi, ekonomi dan sosial dalam membangun kepariwisataan berkelanjutan

II. EKOWISATA DALAM TATANAN KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Tujuan Mata Kuliah:

1. Mahasiswa mampu menganalisis nilai penting ekowisata
2. Mahasiswa mampu menganalisis elemen-elemen penting dalam ekowisata
3. Mahasiswa mampu menganalisis pendekatan pengelolaan ekowisata

II.1 Tatanan Konsep, Nilai Penting dan Implementasi

Salah satu pemanfaatan sumberdaya alam secara tidak langsung adalah pemanfaatan jasa lingkungan hutan untuk ekowisata. Nilai penting dari ekowisata adalah kegiatan ini tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik/ dan psikologis wisatawan. Ekowisata merupakan bentuk wisata yang mengarah ke metatourism. Ekowisata bukan hanya menjual destinasi atau pemandangan tetapi juga menjual ilmu pengetahuan, filosofi dan inovasi. Berbagai kelebihan ini menjadikan ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar.

Ekowisata berasal dari istilah *ecotourism* (ekoturisme). Definisi harfiah dari *ecotourism* sebenarnya

adalah wisata ekologis. Pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami (*natural area*), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Bentuk ekowisata berdasarkan pengertian ini pada dasarnya merupakan bentuk gerakan konservasi. Ekowisata menjadi bentuk baru dari perjalanan bertanggungjawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata (Eplerwood, 1999).

Ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh Kenton Miller (The Father of Ecotourism) tahun 1978 [Rahemtulla & Wellstead, 2001]. Menurut Kenton Miller ekowisata mengandung pengertian perjalanan wisata alam ke kawasan yang relatif masih asri dengan titik berat pada aspek pendidikan. Rumusan ecotourism sudah ada sejak tahun 1987 yang dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain yang menyatakan bahwa *nature or ecotourism can be defined as tourism that consist in travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objectives of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plantas and animal, as well as any existing cultural manifestation (both past and present) found in the areas.*

Ekowisata pada prinsipnya merupakan kegiatan pariwisata yang kegiatannya mengacu pada lima elemen penting sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan yang dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Pendidikan diberikan melalui pemahaman akan pentingnya pelestarian lingkungan, sedangkan pengalaman diberikan melalui kegiatan-kegiatan wisata yang kreatif disertai dengan pelayanan yang prima. Contoh suatu kawasan ekowisata menyajikan aspek sosial budaya tentang kuliner sayuran dari hutan. Implementasinya bukan hanya pada sajian sayuran, tetapi berisikan informasi yang bisa didapatkan wisatawan. Misalnya karakteristik tempat tumbuh, nama latin tumbuhan, proses pemanenan di alam, resep penyajian dan lain-lain. Intinya adalah wisatawan mendapatkan unsur pendidikan dalam kegiatan ekowisata tersebut.



Gambar 2.1. Sayur dari rotan yang dapat menjadi pengalaman bagi wisatawan

2. Memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakteristik lingkungan dan kebudayaan pada daerah

yang dikunjungi. Filter terhadap lingkungan biofisik dan lingkungan budaya dibutuhkan agar karakteristik lingkungan dan kebudayaan tidak menyusut atau bahkan hilang.

3. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya



Gambar 2.2. *Tour guide* sebagai bentuk peran masyarakat dalam ekowisata

4. Memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal, untuk itu, kegiatan ekowisata harus profit (menguntungkan).
5. Berkelanjutan atau berkesinambungan
Konsep ekowisata mencakup tiga pemahaman, yaitu:
 - 1) Perjalanan di kawasan alam yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
 - 2) Penggunaan fasilitas transportasi dan akomodasi yang dikelola masyarakat sekitar kawasan. Selain itu, makanan

yang ditawarkan juga bukan makanan bahan baku impor, semuanya berbasis produk lokal. Termasuk dalam hal jasa pemandu wisata lokal, sehingga wisata ini benar-benar memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal.

- 3) Ekowisata menaruh perhatian besar pada lingkungan alam dan budaya lokal. Para wisatawan yang datang akan belajar banyak dari masyarakat setempat, bukan sebaliknya menggurui mereka. Wisatawan tidak menuntut masyarakat lokal menciptakan pertunjukan dan hiburan ekstra, tetapi mendorong mereka diberi peluang menyaksikan upacara dan pertunjukan yang sudah dimiliki masyarakat setempat

Ekowisata (*ecotourism*) menurut *international ecotourism society* (TIES) merupakan suatu perjalanan yang bertanggungjawab ketempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Ekowisata menurut Fennell (2003) sebagai sebuah bentuk berkelanjutan dari wisata berbasis sumberdaya alam yang fokus utamanya adalah pada pengalaman dan pembelajaran mengenai alam, yang dikelola dengan meminimalisir dampak, non-konsumtif, dan berorientasi lokal.

Ekowisata merupakan bentuk perjalanan menuju kawasan yang masih alami yang bertujuan untuk memahami budaya dan sejarah alami dari lingkungannya, menjaga

integritas ekosistem, sambil menciptakan kesempatan ekonomi untuk membuat sumber daya konservasi dan alam tersebut menguntungkan bagi masyarakat lokal. Pengertian ekowisata di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, yaitu “Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal”.

Berdasarkan pengertian tersebut, ekowisata dalam implemetasinya dapat mengkombinasikan beberapa hal sebagai berikut: (1) perjalanan ke suatu kawasan (seperti hutan alam, goa, kehidupan bawah laut, kehidupan masyarakat hukum adat, kehidupan perkotaan, dan sebagainya), (2) aktivitas pembelajaran (learning) dalam rangka meningkatkan pengalaman wisatawan, (3) menggalakkan upaya konservasi flora, fauna, dan budaya, serta (4) mengembangkan kepedulian dan kapasitas masyarakat lokal. Ekowisata dapat dibedakan menurut tujuan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang dipilihnya, jenis pengalaman yang diinginkanya, tingkat perhatian konservasi sumber daya alamnya dan tingkat partisipasi masyarakat yang diharapkannya

Masyarakat lokal perlu mendapatkan benefit dari pengembangan ekowisata, sehingga ekowisata harus dapat menjadi alat yang potensial untuk memperbaiki perilaku sosial masyarakat untuk tujuan konservasi lingkungan (Buckley, 2003). Ekowisata dapat dilihat berdasarkan keterkaitannya dengan 5 elemen inti yaitu: **bersifat alami, berkelanjutan secara ekologis, lingkungannya bersifat edukatif, menguntungkan masyarakat lokal, menciptakan kepuasan wisatawan.**

Ekowisata berdasarkan lingkup kepariwisataan, tergolong dalam bentuk wisata alam. Ekowisata tidak sekedar menikmati pemandangan alam tetapi lebih jauh lagi mengandung unsur pendidikan, muatan konservasi, memperkaya sosial budaya masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan perlindungan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. Ekowisata berdasarkan jumlah dan intensitas pengunjung adalah terbatas dan memiliki ukuran ekologis dengan memperhatikan daya tampung lingkungan. Ekowisata harus dibedakan dengan wisata alam yang sifatnya wisata massal.

Ekowisata dalam perkembangannya memiliki makna sebagai kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal

serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (Nugroho, 2011). Sebagai suatu usaha ekonomi, efektivitas operasional jasa ekowisata sangat efisien dan ramping. Karakteristiknya adalah jumlah rombongan pengunjung rendah (*low volume*), pelayanan berkualitas (*high quality*) dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi (*high value added*). Konsumen ekowisata adalah mereka yang menginginkan liburan dengan sensasi alam dan interaksi budaya. Mereka bersedia meluangkan waktu, tenaga dan biaya untuk memuaskan keinginannya. Pengelola jasa ekowisata perlu menyediakan akomodasi dan sajian wisata yang baik, aman dan memuaskan. Kedisiplinan dan standar pelayanan tersebut juga bagian dari upaya-upaya melindungi ekosistem jasa ekowisata (Coles, 2006)

Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia (2000) menyebutkan beberapa aspek kunci dalam ekowisata adalah:

1. Jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat (*vs mass tourism*)
2. Pola wisata ramah lingkungan (nilai konservasi)
3. Pola wisata ramah budaya dan adat setempat (nilai edukasi dan wisata)

4. Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (nilai ekonomi)
5. Modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi).

II.2 Pendekatan Pengelolaan Ekowisata

Beberapa pendekatan pengelolaan ekowisata dapat dilakukan melalui pendekatan konservasi, jaminan kelestarian lingkungan, pendekatan perlindungan dan pemanfaatan, serta pendekatan keberpihakan kepada masyarakat. Uraian berikut memberikan penjelasan singkat tentang pendekatan konservasi.

- *Pengelolaan ekowisata dengan pendekatan konservasi.* Konservasi itu sendiri adalah suatu bentuk pemanfaatan berkelanjutan oleh manusia terhadap sumberdaya yang terdapat dalam biosphere. Konservasi sebagai pemanfaatan berkelanjutan dapat memberikan hasil yang cukup bahkan lebih baik untuk generasi kini dan generasi mendatang. Pendekatan ekowisata berbasis konservasi di antaranya adalah pengelolaan ekowisata di Kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata dan Taman Buru. Kawasan hutan lainnya seperti hutan lindung dan hutan produksi dapat dipergunakan pula untuk pengembangan ekowisata. Ekosistem sungai, danau,

rawa, gambut, di daerah hulu atau muara sungai dapat pula dipergunakan untuk ekowisata. Pendekatan pengelolaan ekowisata berbasis konservasi dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga area tersebut tetap lestari sebagai areal alam.



Gambar 2.3. Contoh ekowisata di kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon

Konsep dan implementasi ekowisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kawasan konservasi (protected area). Kawasan konservasi di Indonesia terdiri dari kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA) dan Taman Buru. KSA terdiri yakni cagar alam dan suaka margasatwa; KPA terdiri dari taman nasional, taman wisata alam serta taman hutan raya.

Penetapan kawasan konservasi dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan, dan telah mencapai 414 situs atau luasan 23.1 juta hektar, terdiri 18.4 juta hektar daratan dan 4.7 juta hektar pesisir dan laut (USAID Indonesia, 2004) Proporsi

terbesar dari kawasan konservasi adalah Taman Nasional, yakni 65 persen. Hingga saat ini, Menteri Kehutanan telah menetapkan 50 taman nasional (Tabel 1). Taman Nasional ditetapkan mencakup substansi alasan, posisi, luasan, jenis flora dan fauna endemik atau langka dan job deskripsi pelaksanaan pengembangan. Oleh sebab itu, kelembagaan TN dianggap sebagai komponen penting dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta upaya-upaya konservasi keanekaragaman hayati dalam skala nasional maupun internasional (Rothberg, 1999).

Tabel 2.1. Kawasan Taman Nasional di Indonesia

Jawa	1. Karimunjawa	5. Gunung Gede Pangrango	9. Alas Purwo
	2. Bromo Tengger Semeru	6. Gunung Halimun	10. Gunung Merapi
	3. Meru Betiri	7. Kep Seribu	11. Gunung Merbabu
	4. Bularan	8. Ujung Kulon ^c	12. Gunung Ciemai
Sumatera	1. Gunung Leuser ^{a,b}	5. Bukit Duabelas	9. Way Kambas
	2. Sibran ^a	6. Berauk ^c	10. Hutan Gajah
	3. Kerinci Seblat ^c	7. Sembilang	11. Tesso Nilo
	4. Bukit Tigapuluh	8. Bukit Barisan Selatan ^b	
Kalimantan	1. Gunung Palung	4. Bukit Baka-Bekit Raya	7. Kraya Mentawai
	2. Danau Sentarum ^c	5. Tanjung Puing ^b	8. Sebangau
	3. Betang Keruhun	6. Kutai	
Sulawesi	1. Huayku	4. Taka Bonerate	7. Kepulauan Togean
	2. Bogani Nani Warabose	5. Rawa Aepa Watumohai	8. Daintumung - Dufourung
	3. Lora Lindu ^a	6. Wakaobi	
Bali dan Nusa Tenggara	1. Bali Barat	3. Komodo ^{a,c}	5. Lalawangi Wanggamet
	2. Gunung Rinjani	4. Manupea Tanah Dora	6. Kelimutu
Molukku dan Papua	1. Mamberamo	3. Teluk Cenderawasih	5. Wasur
	2. Akitajawa - Lolohua	4. Lorentz ^b	

Keterangan: ^a Cagar Budaya, ^b World Heritage Sites, ^c Ramsar Sites

Pengembangan jasa ekowisata dalam tingkat pengelolaan oleh Taman nasional di Indonesia telah berkembang. Struktur dan

fungsi taman nasional memperlihatkan kompetensi mendukung pengembangan ekowisata. Taman nasional juga ikut berperan menginisiasi, mendampingi atau memfasilitasi pengembangan ekowisata di desa-desa sekitar wilayah Taman Nasional. Aktivitas jasa ekowisata di luar wilayah taman nasional juga berkembang. Wilayah tujuan ekowisata tersebut biasanya memiliki kearifan, pengalaman dan nilai-nilai budaya yang menyatu dengan lingkungan untuk mendukung kehidupan ekonomi. Wilayah tujuan ekowisata itu dapat menjadi bagian dari ekosistem pesisir, lautan, atau daratan; di sekitar kawasan konservasi, desa atau wilayah yang memiliki nilai-nilai khas yang diwariskan untuk generasi mendatang. Pengembangan ekowisata di luar wilayah taman nasional banyak dikembangkan oleh organisasi masyarakat atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam ekowisata. Mereka ini biasanya memiliki pengetahuan ekowisata, informasi pasar, modal dan potensi wilayah tujuan ekowisata. Mereka kemudian mendapat sambutan positif dari penduduk lokal melalui manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan, sehingga seluruh stakeholder ekowisata bersama-sama bertanggungjawab memastikan keberlanjutan sumberdaya ekowisata.

- *Pendekatan ekowisata yang menjamin kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan yang dimaksud adalah:*

- Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan.
- Melindungi keanekaragaman hayati.
- Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya



Gambar 2.4. Menjual jasa lingkungan melalui ekowisata dapat menjamin kelestarian alam

- *Pendekatan ekowisata dengan pendekatan pelestarian dan pemanfaatan* terhadap kawasan alam. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menitikberatkan pelestarian dibanding pemanfaatan. Melalui program pelestarian, maka pemanfaatan dapat diraih sekaligus.



Gambar 2.5. Pelaksanaan ekowisata yang mengarah pada tindakan pelestarian alam



Gambar 2.6. Paket kegiatan penanaman dalam ekowisata menjadi tindakan pelestarian alam

Pengelolaan ekowisata berdasarkan pendekatan keberpihakan kepada masyarakat. Maksud dari pendekatan ini bertujuan agar kita mampu mempertahankan budaya lokal dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur pajak konservasi untuk membiayai secara langsung kebutuhan kawasan dan masyarakat lokal



Gambar 2.7. Aktivitas budaya masyarakat sebagai bagian dari destinasi wisata

II.3 Pengembangan Ekowisata

Terdapat dua aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan ekowisata yaitu: aspek destinasi dan aspek pemasaran. Aspek market perlu dipertimbangkan namun macam, sifat dan perilaku obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya diusahakan untuk menjaga kelestarian dan keberadaannya.



Gambar 2.8. Contoh aspek destinasi yang ditonjolkan dalam pengembangan ekowisata

The *Ecotourism Society* (Epler Wood/1999)

menyebutkan ada delapan prinsip, yaitu:

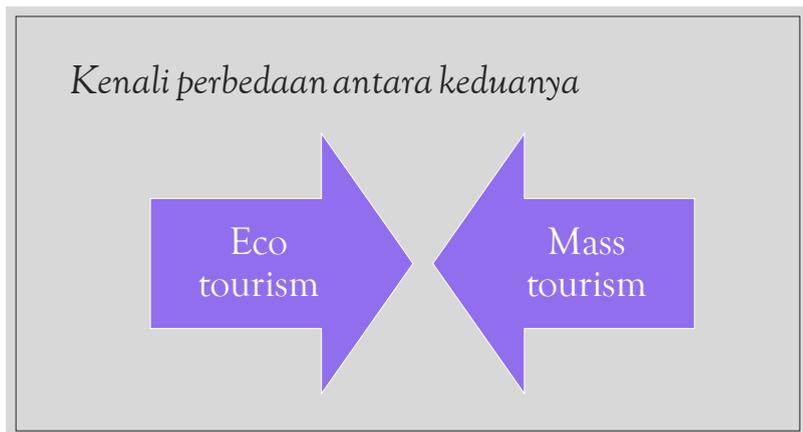
- 1) Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat
- 2) Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses pendidikan ini dapat dilakukan langsung di alam

- 3) Pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan pajak konservasi dapat dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam
- 4) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut aktif
- 5) Penghasilan masyarakat. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam
- 6) Menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Apabila ada upaya disharmonis dengan alam akan merusak produk wisata ekologis ini. Hindarkan sejauh mungkin penggunaan minyak, mengkonservasi flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya masyarakat
- 7) Daya dukung lingkungan. Lingkungan alam umumnya mempunyai daya dukung yang lebih rendah dengan

daya dukung kawasan buatan. Meskipun mungkin permintaan sangat banyak, tetapi daya dukunglah yang membatasi.

- 8) Peluang penghasilan terhadap negara. suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka devisa dan belanja wisatawan didorong sebesar-besarnya dinikmati oleh negara atau negara bagian atau pemerintah daerah setempat

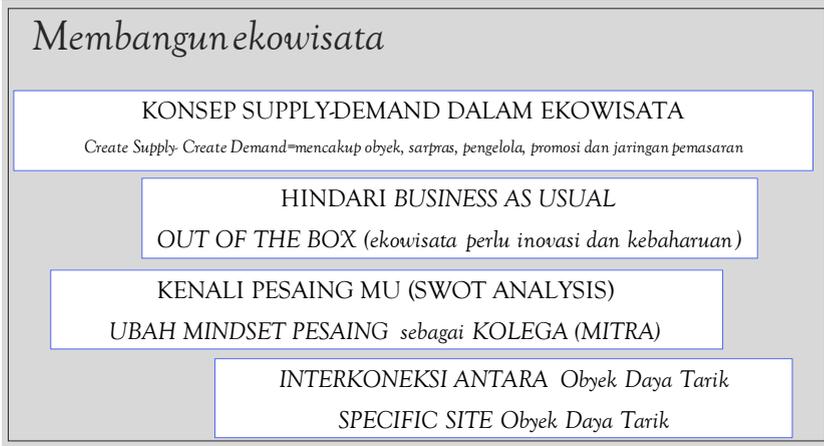
Pengembangan ekowisata memerlukan tentang perbedaan antara mass wisata dan ekowisata. Implementasi ekowisata dalam kesehariaanya kerap pengelola ekowisata belum dapat membedakan penerapan ekowisata dan mass wisata.



Gambar 2.9. Penting mengenali perbedaan antara ekowisata dan mass wisata

Pembangunan kepariwisataan dalam realitanya di Indonesia umumnya dan Bali khususnya masih belum mampu mewujudkan pariwisata yang ekowisata (*ecotourist*). Karena pariwisata massal (*mass tourism*) yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan masih mendominasi praktek pengembangan pariwisata. Penyebab kurang tergalinya dan terkelolanya objek ekowisata (Ferdinal Asmin, 2018) dapat dilihat dalam konteks sistem kepariwisataan itu sendiri, yaitu adanya kendala pada sisi suplai (*product driven*), kurangnya pemahaman terhadap pasar (*market driven*), banyaknya kendala dalam kelembagaan dan kurangnya dukungan kebijakan. Empat kendala atau keterbatasan dalam pengembangan ekowisata merupakan kenyataan yang dihadapi oleh semua stakeholder dalam kepariwisataan.

Membangun ekowisata perlu perpaduan antara obyek daya tarik wisata yang sifatnya artifisial dan natural. Hanya saja segala yang sifatnya artifisial tidak terlalu dominan (*don't too many artificial destination objects*). Penting untuk mengkombinasikan antara *mass tourism* dan *ecotourism* dapat dilakukan dalam suatu obyek daya tarik wisata. Gambar berikut memberikan beberapa poin penting dalam membangun ekowisata bagi para pengelola.



Gambar 2.10. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pengelola ekowisata

II.4 SIMPULAN

Ekowisata dengan berbagai elemen penting di dalamnya menjadi satu alternatif pemanfaatan jasa lingkungan yang sifat implementasinya memiliki berbagai batasan-batasan. Kespesifikan ekowisata menjadikan tipe pengelolaan jasa lingkungan ini relatif aman diterapkan dalam pembangunan bidang ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Tentu saja dalam pengembangan ekowisata selain fokus pada manajemen sumberdaya dan kelengkapan di dalamnya, juga harus didukung dengan aspek pemasaran yang baik. Berbagai metode dan inovasi sangat diperlukan agar ekowisata dapat terus berjalan dan menyumbangkan benefit untuk berbagai aspek kehidupan.

Soal-soal

1. Berikan penjelasan tentang nilai penting ekowisata, bagaimana mekanismenya sehingga ekowisata memiliki nilai penting dalam berbagai bidang
2. Terdapat paling tidak 5 elemen inti dalam ekowisata, beri penjelasan terhadap pernyataan tersebut
3. Terdapat berbagai pendekatan pengelolaan ekowisata, deskripsikan dari berbagai contoh kasus tentang pendekatan pengelolaan ekowisata tersebut

Tugas Mandiri: Review jurnal tentang pengelolaan ekowisata di suatu wilayah. Minimal jurnal yang direview sebanyak 3 jurnal

III. EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT

Tujuan Pembelajaran Mata Kuliah:

1. Mahasiswa mampu menganalisis nilai penting yang terkandung dalam ekowisata berbasis masyarakat
2. Mahasiswa mampu menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ekowisata
3. Mahasiswa mampu menganalisis berbagai contoh kasus dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat

III.1 Konsep Ekowisata Berbasis Masyarakat

Konsep ekowisata berbasis masyarakat, yaitu wisata yang menyuguhkan segala sumber daya wilayah yang masih alami, yang tidak hanya mengembangkan aspek lingkungan dalam hal konservasi saja, namun juga memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar, sebagai salah satu upaya pengembangan pedesaan untuk meningkatkan perekonomian lokal, di mana masyarakat di kawasan tersebut merupakan pemegang kendali utama.

Konsep ekowisata berbasis masyarakat merupakan salah satu upaya pengembangan pedesaan dalam sektor pariwisata. Lane dan Sharpley (1997, dalam Chuang, 2010) menyatakan bahwa pariwisata pedesaan dapat muncul jika ada perilaku wisata yang muncul di wilayah pedesaan, dan Roberts dan Hall (2001, dalam Chuang, 2010) menambahkan

bahwa dalam pariwisata pedesaan harus ada karakteristik khusus yang dapat berupa budaya tradisional, budaya pertanian, pemandangan.

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan pengembangan wisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat setempat yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia, 2009)



Gambar 3.1. Ekowisata Rammang-Rammang Kabupatern Maros Sulawesi Selatan

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, terutama pada tahap awal, pendampingan masyarakat dibutuhkan agar masyarakat terlibat dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan. Pola ekowisata berbasis masyarakat adalah pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan semua keuntungan yang diperoleh.

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat akan berpotensi lebih berkembang dengan menggunakan pendekatan kerjasama antar para pihak (*stakeholders*), termasuk pemerintah, masyarakat, usaha pariwisata, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan lembaga lainnya. Pendekatan multipihak dalam satu kelembagaan yang baik diharapkan dapat menyelaraskan persepsi tentang tujuan pariwisata berbasis masyarakat dan mendukung tercegahnya dampak dari pembangunan sektor pariwisata yang tidak diinginkan dan menjadi landasan untuk mengatasi masalah. Hal ini penting dipertimbangkan karena kegiatan ekowisata tidak hanya menimbulkan dampak positif saja, tapi dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, baik terhadap lingkungan objek ekowisata maupun terhadap lingkungan sosial budaya setempat (Supriana, 1997).

Menurut Lynn dan Brown (2003), kegiatan ekowisata di kawasan wisata alam dapat menyebabkan dampak seperti erosi, pelebaran dan pelumpuran di jalan setapak, kerusakan tumbuhan, kebakaran, dan sampah yang kesemuanya dapat mengurangi kualitas lingkungan wisata alam dan pengalaman wisata dari pengunjung.

III.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Ekowisata

Pemberdayaan adalah cara agar rakyat, masyarakat, organisasi, komunitas diarahkan untuk mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Anwas. 2014). Pemberdayaan tidak hanya memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja, tetapi mengandung makna proses **pendidikan** dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. Masyarakat menjadi salah satu *stakeholder* (para pihak) selain pemerintah dan swasta dalam dunia kepariwisataan memiliki sumber daya berupa adat istiadat, tradisi dan budaya guna menunjang keberlangsungan pariwisata. Masyarakat juga dapat berperan sebagai pelaku dalam pembangunan dan

pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Kedudukan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam upaya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di daerah.

Pembangunan dan pengembangan ekowisata memerlukan peningkatan peranan masyarakat lokal. Upaya pemberdayaan (*empowerment*) perlu dilakukan agar masyarakat lokal dapat berperan secara aktif dan optimal yang sekaligus mendapatkan manfaat positif dari kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata tersebut yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraannya. Peningkatan peran masyarakat diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan karena pemanfaatan potensi pariwisata dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan yang optimal jika dikelola dengan baik oleh masyarakat itu sendiri.

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata meliputi:

- a. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan ekowisata;
- b. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha ekowisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat

- lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang ekowisata;
 - d. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha ekowisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - e. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha ekowisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - f. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif ekowisata setempat;

III.3 Partisipasi Masyarakat dalam Ekowisata

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan atau program yang meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, penilaian, dan pemanfaatan hasil. Partisipasi tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses.

Peran aktif yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan penikmat hasilnya atau yang dikenal dengan “*genuine participation*” atau dengan kata lain masyarakat sebagai pelaku pariwisata (Pitana. 2002). Tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan adalah partisipasi masyarakat lokal yang tinggi (Anwas. 2014).

Partisipasi masyarakat dalam ekowisata memberikan gambaran bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan ekowisata. Ekowisata yang dimaksud di sini baik berupa ekowisata yang dikelola oleh pemerintah, dikelola oleh personal/swasta atau dikelola mandiri oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat pengelola wisata umumnya disebut dengan istilah Pokdarwis (kelompok sadar wisata)

Perlu diciptakan suasana kondusif untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat (Sastrayuda. 2010). Suasana kondusif yang diciptakan berupa situasi yang dapat menggerakkan masyarakat untuk menarik perhatian dan kepedulian pada kegiatan ekowisata dan kesediaan bekerjasama secara aktif dan berkelanjutan.

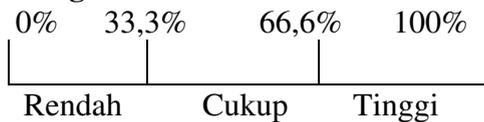
III.4 Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengembangan Ekowisata

Partisipasi masyarakat perlu dianalisis dalam rangka mendukung ketercapaian program pembangunan dan

pengembangan ekowisata. Metode analisisnya dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Pendekatan kualitatif umumnya dapat dilakukan dengan mendeskripsikan karakteristik destinasi wisata berikut penjelasan bentuk partisipasi yang diberikan dalam pengembangan ekowisata.

Pendekatan kuantitatif dapat juga digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat. Salah satu pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah skala Likert. Penerapan skala Likert menggunakan tingkatan yang ganjil, bisa 3, 5, 7. Berikut tingkatan skala Likert yang digunakan adalah:

3 tingkatan skala Likert.



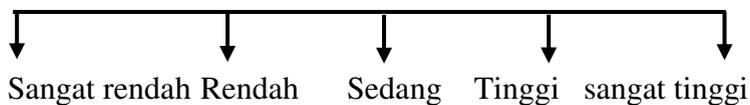
Keterangan kriteria interpretasi skor persepsi masyarakat:

Angka 0% - 33,3% = Rendah

Angka 33,4% - 66,6% = Cukup

Angka 66,7% - 100% = Tinggi

5 tingkatan skala Likert



Keterangan :

0% – 19% (SR) = Tingkat Partisipasi Masyarakat dikatakan Sangat Rendah.

20% – 39% (R) = Tingkat partisipasi masyarakat dikatakan Rendah.

40% – 59% (S) = Tingkat Paartisipasi Masyarakat dikatakan Sedang.

60% – 79% (T) = Tingkat Partisipasi Masyarakat dikatakan Tinggi.

80% – 100% (ST) = Tingkat Partisipasi Masyarakat dikatakan Sangat Tinggi.

Contoh kasus partisipasi masyarakat:

Partisipasi Masyarakat di Desa Wisata Tablanusu

- Karakteristik Destinasi Wisata Desa Tablanusu

Desa Tablanusu terletak di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Obyek utama desa wisata ini adalah Pantai Tablanusu. Desa ini memiliki luas sekitar 230,5 hektar yang didiami 10 suku, yaitu Suku Sumile, Danya, Suwae, Apaserai, Serantow, Wambena, Somisu, Selli, Yufuwai, dan Yakarimilena. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sejak tahun 2008 telah menetapkan desa ini sebagai desa wisata. Desa Tablanusu dijadikan salah satu desa wisata karena desa tersebut memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor lainnya.

Potensi yang dimiliki Desa Tablanusu antara lain keunikan alam, adat istiadat, flora dan fauna, bahasa serta budaya. Wisatawan dapat menikmati wisata hutan, wisata pantai, wisata telaga air tawar, wisata sejarah, dan wisata budaya.



Gambar 3.2 Pantai Tablanusu

Pantai Tablanusu memiliki keunikan karakteristik pantai tersendiri. Pantai di sini bukan berpasir putih tetapi tepian pantai dihiasi oleh batuan koral hitam yang membedakan dengan pantai lainnya.



Gambar 3.3.. Keunikan pantai Tablanusu dengan koral hitam

Hutan yang berada di sekitar pantai menyimpan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi daya tarik ekowisata di des aini. Kampung di pesisir pantai berdasarkan fakta sejarah menjadi basis tentara sekutu yang mendarat di kawasan timur Indonesia. Banyak peninggalan sejarah masih terpelihara di des aini.

Desa Tablanusu memiliki lokasi yang strategis karena berdekatan dengan dua pantai yang merupakan obyek wisata favorit di Distrik Depapre, yaitu Pantai Amay dan Harlem. Pantai Amay dapat ditempuh dengan menggunakan jalur transportasi perahu. Potensi desa Tablanusu dan sekitarnya menjadikan kegiatan ekowisata dapat dilakukan terpadu dan

terintegrasi, karena masing-masing wilayah menawarkan keunikan yang berbeda satu sama lainnya.



Gambar 3.4. Pantai Amai

Pantai Amai ini memiliki daya tarik pasir putihnya dan air laut yang jernih. Formasi vegetasi pantai dan mangrove berada di sekitar pantai Amai. Dibelakang pantai dapat dinikmati pemandangan bukit-bukit kecil dengan hijaunya vegetasi. Kontur pantai yang cukup landai, ombak yang ada di kawasan terolong tidak besar. Kegiatan ekowisata yang bisa dinikmati di pulau Amai di antaranya adalah:

- a) Menikmati panorama pantai dan lingkungan sekelilingnya. Variasi bentuk alam yang cukup eksotis

menjadikan pemandangan di wilayah ini sangat potensial sebagai obyek daya tarik wisata

- b) Bermain air. Pantai yang landai dengan ombak yang ringan menjadikan pantai ini banyak digunakan untuk bermain air, berenang dan lain-lain
- c) Menikmati keindahan alam bawah laut. Air jernih dan tenang dari pantai ini membuat destinasi ini banyak dimanfaatkan untuk menikmati keindahan bawah lautnya dengan cara snorkeling dan diving
- d) Pemandangan saat *Sunset*. View sunset menjadi destinasi andalan dari pantai Amau
- e) Permainan sekitar pantai. Pasir putih pantai yang bersih biasanya dimanfaatkan pengunjung untuk bermain di pantai. Permainan volley pantai banyak dilakukan di wilayah ini

Pantai Harlem dikenal dengan sebutan *virgin beach*, menawarkan pemandangan pantai dengan degradasi warna yang menarik.



Gambar 3.5. Snorkeling di pantai Harlem



Gambar 3.6. Kebeningan pantai Harlem (*Virgin Beach*)

- **Karakteristik Partisipasi Masyarakat dalam ekowisata Desa Tablanusu**

Bentuk partisipasi berupa keterlibatan masyarakat yang dimulai dari proses awal *perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengembangan pariwisata* di Desa Tablanusu. Partisipasi masyarakat terbagi menjadi dua yaitu partisipasi masyarakat terkait dengan program-program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua dan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dan partisipasi masyarakat dalam sektor informal.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam perencanaan yaitu keterlibatan masyarakat lokal terutama berkaitan dengan identifikasi masalah atau persoalan, identifikasi potensi pengembangan, analisis, dan peramalan terhadap kondisi lingkungan di masa mendatang, pengembangan alternatif rencana dan fasilitas, dan sebagainya (Sunaryo 2013).

Menurut Ericson (dalam Slamet 1994) menyatakan bahwa bentuk partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*) adalah pelibatan seseorang atau sekelompok orang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan.

Partisipasi masyarakat Desa Tablanusu pada tahap perencanaan yaitu masyarakat diikutkan dalam musyawarah yang membahas aspirasi masyarakat lokal Desa Tablanusu yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di desa ini. Peran masyarakat hanya sebatas memberikan ide, pendapat maupun saran pada musyawarah namun tidak ada jaminan bahwa pendapat serta saran masyarakat akan dipakai untuk membuat

kebijakan. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan saran untuk perencanaan program-program pengembangan pariwisata di Desa Tablanusu namun keputusan tetap dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan berada pada tahapan terapi (*therapy*). Tahapan terapi (*therapy*) telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemerintah

Bentuk partisipasi masyarakat Desa Tablanusu dalam pengembangan Desa Tablanusu dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang telah disepakati oleh masyarakat dan pemerintah. Beberapa bentuk partisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bimbingan teknis penguatan ketrampilan bidang kependamuan wisata lokal bagi kelompok sadar wisata (POKDARWIS)
- b. Program pelatihan selam tingkat lanjutan dan tingkat *rescue*. Tujuan utama dalam program ini yaitu memberikan pelatihan serta pengetahuan cara menyelam yang sesuai dengan prosedur yang benar.

Partisipasi Masyarakat dalam Sektor Informal

Beberapa partisipasi masyarakat dalam sektor informal di antaranya adalah: pengelola *resort*, karyawan *resort*, penagih gasebo, usaha dagang, penyewaan pelampung, usaha *homestay* dan toilet umum, pengendara *banana boat* dan penyedia perahu.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Proses pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Terkait dengan pengawasan terhadap program-program yang telah dirancang dan dilaksanakan di Desa Wisata Tablanusu, pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak pengelola. Bentuk pengawasan yang dilakukan seperti peninjauan fasilitas-fasilitas pariwisata yang dibangun oleh pihak pemerintah, peninjauan terhadap pelaksanaan program-program pengembangan dan pengawasan terhadap tingkat keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan untuk pengembangan pariwisata di Desa Tablanusu.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat desa yaitu membuat beberapa ketentuan dan tata tertib kepada masyarakat yang berpartisipasi di sektor informal. Masyarakat yang bekerja sebagai pedagang yang berjualan di sekitar kawasan pantai Tablanusu, diberlakukan aturan tata tertib

berupa kewajiban gotong royong dalam menjaga kebersihan wilayah pantai bagi semua pedagang.

Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi

Tahap evaluasi juga dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan aparat desa, pihak pengelola dan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan lebih difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia di Desa Tablanusu. Evaluasi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal Desa Tablanusu.

Evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di Desa Tablanusu yaitu menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan serta penyuluhan pariwisata, menyiapkan bahan kerjasama dan penyelenggaraan pembinaan pariwisata terhadap masyarakat lokal di Desa Tablanusu.

Karakteristik partisipasi masyarakat dalam tahapan pengawasan hingga evaluasi berdasarkan teori partisipasi Arnstein (1969), bentuk partisipasi masyarakat berada pada tahap informasi (*information*). Partisipasi pada jenjang ini teridentifikasi komunikasi sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat Desa Tablanusu tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (*feed back*). Fokus pengawasan

pemerintah lebih mengarah pada fasilitas yang dibangun oleh pihak pemerintah

III.5 SIMPULAN

Konsep ekowisata berbasis masyarakat merupakan salah satu upaya pengembangan pedesaan dalam sektor pariwisata. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat akan berpotensi lebih berkembang dengan menggunakan pendekatan kerjasama antar para pihak (*stakeholders*). Langkah evaluasi dalam upaya pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan mengukur tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi menjadi dasar dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat untuk tindakan manajemen selanjutnya

Soal-soal

1. Berikan penjelasan tentang nilai penting yang terkandung dalam ekowisata berbasis masyarakat
2. Berikan penjelasan tentang pendekatan analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ekowisata

Tugas Mandiri: Buatlah makalah tentang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, berikan minimal 3 contoh kasus dalam pengembangan ekowisata tersebut

IV. MEMBANGUN DESA WISATA

Tujuan Pembelajaran Mata Kuliah:

1. Mahasiswa mampu memberikan penjelasan tentang konsep pengembangan desa wisata
2. Mahasiswa mampu menguraikan komponen-komponen penting dalam pengembangan desa wisata
3. Mahasiswa mampu memberikan alternatif solusi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan desa wisata

IV.1 Definisi dan Konsep Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya.

Inskeep (1991) mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Nuryanti (1992)

mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.



Gambar 4.1 Berbagai hal dalam pengembangan desa wisata

Priasukamana dan Mulyadi (2001) mengemukakan bahwa desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosila ekonomi, social budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan, minuman, dan kebutuhan wisata lainnya

Kaitannya dengan konsep pengembangan desa wisata, Pearce (1995) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk

mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Peran masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan objek wisata karena keunikan yang ada serta sumberdaya yang tersedia dan juga keunikan tradisinya merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001).



Gambar 4.2. Wisata desa berbasis karakteristik spesifik desa

Beberapa komponen terpenting dalam desa wisata adalah (1) akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal dan atau/ unit unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk; termasuk di dalamnya segala fasilitas untuk pelayanan kebutuhan pokok wisatawan (2) atraksi, yakni

seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik. Bangunan unik yang bernilai budaya, lingkungan biofisik yang unik dan spesifik juga dapat menjadi bagian dari atraksi wisata, (3) Pengembangan sistem informasi, wisata yang menawarkan unsur pendidikan dan pengetahuan memerlukan pengelolaan system informasi sehingga wisatawan dapat menerima aliran informasi tentang obyek destinasi wisata yang dikunjungi. Beberapa mekanisme dalam penyampaian informasi di antaranya adalah tour guidance, papan informasi, *digital platform*, peta situasi wilayah wisata dan lain-lain, (4) penciptaan pasar melalui berbagai penawaran paket yang diajukan dalam wisata desa. Banyak metode dalam pendekatan pasar untuk mengembangkan desa wisata



Gambar 4.3 Pendekatan pasar dlm pengembangan desa wisata

IV.2 Transformasi Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Pembangunan kepariwisataan memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi wilayah.

Pariwisata berperan mempercepat proses transformasi ekonomi termasuk di wilayah perdesaan. Penduduk desa yang umumnya berprofesi sebagai petani secara bertahap dapat belajar mengembangkan jasa-jasa lingkungan dan sosial di wilayahnya masing-masing. Momentum tradisi, budaya dan eksotisme lingkungan dapat dikemas sebagai produk wisata desa yang menarik bagi pengunjung dari luar wilayah. Konsep pembangunan wisata berbasis budaya atau lingkungan di desa, akan bersinergi dengan pembangunan sektor lainnya dan memberikan alternatif kesejahteraan bagi penduduk desa.

Usaha wisata terbukti menunjukkan kelayakan ekonomi lebih tinggi dibanding usaha tani (Purnomowati, Nugroho dan Negara, 2012). Wisata Desa telah menjadi program andalan di sejumlah negara, misalnya Malaysia (Liu,

2006; Kumar, Gill dan Kunasekaran, 2012) dan Thailand (Saraithong and Chanchaoenchai, 2011).

Peluang mengembangkan wisata di desa, atau pengembangan desa wisata sangat terbuka lebar. Menurut Parks et al. (2009), kelompok masyarakat ekonomi kelas menengah memiliki permintaan yang tinggi terhadap perjalanan dan wisata (Parks *et al.* 2009). Peningkatan sarana infrastruktur, khususnya transportasi, memungkinkan akses ke berbagai wilayah tujuan wisata. Melihat potensi ekonomi ini, wilayah perdesaan perlu berbenah menyiapkan diri untuk menerima kehadiran wisatawan dari luar wilayah atau kota-kota lain. Sudah banyak pemerintah daerah mengoptimalkan pengembangan jasa wisata perdesaan, dan memperoleh manfaat kesejahteraan bagi warganya (Nugroho, 2010)



Gambar 4.4 Ekowisata Desa Lantebung Tamanrae Makasar

Pengembangan pariwisata pedesaan merupakan dampak dari adanya perubahan minat wisatawan akan tujuan wisata yang bervariasi. Hiruk pikuk keadaan perkotaan menyebabkan tumbuhnya keinginan wisatawan untuk menikmati perjalanan yang bisa membuat mereka tenang dari segala kepenatan, serta juga bisa berinteraksi langsung dengan alam dan masyarakat untuk mempelajari kebudayaan lokal. Objek wisata pedesaan merupakan keadaan suatu desa yang mempunyai sarana atau objek yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan mempunyai potensi besar dalam sektor pariwisata, sehingga cocok untuk dijadikan desa wisata. Menurut Chafid Fandeli secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya (Chafid Fandeli, 2002). Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat

Pengembangan wisata dalam desa memberikan keuntungan bagi pembangunan ekonomi. Desa yang selama

ini identik dengan pertanian akan mengalami perubahan paradigma sosial budaya menjadi berbudaya melayani wisatawan. Melayani jasa wisata ini tentu tidak mudah. Proses transformasi struktur ekonomi yang biasa bergerak dari sektor pertanian dan manufaktur kemudian ke sektor jasa. Transformasi ekonomi tersebut melompat dari pertanian langsung ke jasa. Hal ini sangat positif, karena penduduk desa pada dasarnya sudah menguasai substansi lingkungan dan budaya.

Tugas berikutnya adalah memberdayakan penduduk desa dengan ketrampilan maupun entrepreneurship untuk menyajikan jasa wisata dan memberikan kepuasan kepada pengunjung. Penduduk desa tidak sepenuhnya menggantungkan kepada sektor pertanian, tetapi juga melayani jasa wisata yang memberikan kesejahteraan lebih layak. Wajah desa akan dipenuhi kegiatan bisnis jasa wisata yang menguntungkan (orientasi profit) tetapi juga berorientasi sosial (non profit) untuk mendukung konservasi lingkungan dan budaya. Jasa wisata desa lebih jauh lagi juga akan menghasilkan kaitan ekonomi dan inovasi bagi lahirnya usaha pengolahan dan jasa-jasa penunjang lainnya



Gambar 4.5 Masyarakat membangun mandiri desa wisata

Desa wisata dan lingkungan sekitarnya memiliki daya tarik wisata alam, budaya dan buatan. Kehidupan desa bukan saja memberikan pengalaman yang berbeda dengan kota, tetapi dipandang sebagai upaya menciptakan keseimbangan kehidupan. Pembangunan ekonomi desa berperan dalam pengembangan nilai kemanusiaan dan lingkungan. Desa dapat memberikan tempat yang memberikan kepuasan atau refreshing, serta pembelajaran banyak hal khususnya tentang konservasi lingkungan dan budaya (Nugroho et al., 2016).

Permintaan terhadap layanan desa wisata, atau berbagai obyek dan kehidupan desa sangatlah tinggi. Wisatawan sangat serius melakukan perjalanan wisata menuju desa atau daerah-daerah yang terpencil. Wisatawan domestik dan asing bersedia membayar dengan harga pantas, melakukan perjalanan jauh, untuk mau hadir di desa terpencil seperti Ngadas atau Ngadisari (Bromo), Candirejo (Magelang), Rajegwesi (Banyuwangi), Wanci (Wakatobi), Komodo (Nusa Tenggara Barat), TN Baluran, Raja Ampat (Papua) atau tempat eksotik lain di penjuru Nusantara

Beberapa alasan umum yang membuat wisatawan berkunjung ke suatu daerah/desa adalah untuk menikmati keindahan alam, mengamati keseharian penduduk setempat yang unik dan spesifik, menyaksikan corak budaya yang unik, atau mempelajari sejarah daerah tersebut. Wisatawan datang untuk menikmati hal-hal yang tidak dapat mereka temukan dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan keadaan yang nyaman dan sensasional. Menciptakan rasa nyaman bagi wisatawan menikmati obyek destinasi wisata di desa adalah dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Ciptakan pelayanan yang terbaik; Wisatawan yang dilayani dengan baik misalnya pelayanan yang ramah dari supir taksi, pedagang asongan yang berjualan dengan tertib, warung makan yang bersih, hotel yang

indah akan memberikan kenangan yang tidak terlupakan bagi wisatawan. Suatu saat mereka akan kembali ke daerah kita untuk mencari sensasi pariwisata di daerah kita

2. Menjaga keindahan dan kelestarian alam, serta budaya karena hal tersebut merupakan aset pariwisata kita. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia memiliki program yang disebut sapta pesona (aman, tertib, bersih, indah, ramah dan kenangan). Ada tujuh unsur yang perlu diterapkan untuk memberikan pelayanan yang baik serta menjaga keindahan dan kelestarian alam dan budaya di daerah kita.
3. Kreatif dan inovatif dalam memberikan jasa wisata. Seperti pembangunan di sektor lain, kreatifitas dan inovasi diperlukan agar lahir suatu suasana dinamik dari ekowisata.

IV.3 SIMPULAN

Peran masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan objek wisata karena keunikan yang ada serta sumberdaya yang tersedia dan juga keunikan tradisinya merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Transformasi struktur ekonomi yang biasa bergerak dari sektor pertanian dan manufaktur kemudian ke sektor jasa menjadi kendala sekaligus tantangan dalam pengembangan desa wisata.

Soal-soal

1. Berikan penjelasan tentang konsep pengembangan desa wisata
2. Uraikan komponen-komponen penting dalam pengembangan desa wisata
3. Jelaskan berbagai faktor kendala dalam pengembangan desa wisata. Berikan analisis dalam menjawab permasalahan pengembangan desa wisata.

V. JASA LINGKUNGAN DAN IMBAL JASA LINGKUNGAN

Tujuan Pembelajaran Mata Kuliah:

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang jasa lingkungan dan imbal jasa lingkungan
2. Mahasiswa mampu menganalisis para pihak yang terkait dalam proses imbal jasa lingkungan
3. Mahasiswa mampu menganalisis bentuk kegiatan yang dapat dikenai imbal jasa lingkungan
4. Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme penerapan imbal jasa lingkungan

V.1 Prinsip Pelaksanaan Imbal Jasa Lingkungan

Ronald Harry Coase, penerima hadiah Nobel bidang ekonomi dalam artikelnya “The Problem of Social Cost” yang ditulisnya di tahun 1960, menyatakan sejauh kerugian lingkungan disebabkan karena alasan keuangan, maka solusi apapun akan berdampak sama kepada lingkungan, terlepas dari kepada siapa hak penguasaannya diberikan. Siapapun yang menggunakan lingkungan untuk mencari nafkah maka akan tetap merusak lingkungan. Diperlukan pendekatan dan metode dimana orang menggunakan lingkungan dalam mendapatkan nafkah namun tanpa merusaknya

Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan

kehidupan di antaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya (PP 46 tahun 2017 Pasal 1 ayat 8) . Jasa Lingkungan atau sering disebut pula sebagai jasa ekosistem (*ecosystem services*) adalah kontribusi langsung dan tidak langsung dari ekosistem bagi kesejahteraan manusia (TEEB, 2010; Braat and de Groot, 2012)

Klasifikasi tentang jasa lingkungan dapat diindikasikan dari manfaat yang diperoleh oleh manusia. Berdasarkan manfaatnya jasa lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Jasa penyediaan (komoditas) seperti makanan, air bersih dan herbal;
2. Jasa pengaturan (ekosistem) seperti penyaringan polutan oleh lahan basah, pengaturan iklim melalui penyimpanan karbon dan siklus air, polinasi dan perlindungan dari bencana alam;
3. Jasa pemenuhan budaya seperti rekreasi, spiritual dan nilai keindahan dan edukasi;
4. Jasa pendukung seperti formasi tanah, fotosintesis dan siklus nutrisi



Gambar 5.1 Klasifikasi jasa lingkungan berdasarkan aspek manfaat bagi manusia

Jasa lingkungan didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.



Gambar 5.2 Biaya kegiatan pemeliharaan hutan, air yang dikompensasi sebagai jasa lingkungan

Imbal Jasa lingkungan (PJL) atau *Payment for Ecosystem Services* pada awalnya didefinisikan sebagai “Transaksi sukarela untuk jasa lingkungan ataupun guna lahan yang berkontribusi dalam penyediaan jasa lingkungan, antara minimal satu orang pembeli dan satu orang penjual jasa lingkungan, jika dan hanya jika penyedia berhasil memastikan ketersediaan jasa lingkungan”. Ilustrasi tentang hal-hal yang mendasari tentang PJL dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 5.3 Contoh mekanisme imbal jasa lingkungan dalam penyediaan air

Transaksi pasar (*market-based transaction*), dimana proses penyediaan jasa lingkungan dianggap seperti barang ekonomi pada umumnya, dimana umumnya faktor sebab-akibat yang menentukan ketersediaan maupun jumlah dan besaran nilainya dapat dijelaskan dengan lugas. Permasalahan yang sering ditemui saat pelaksanaan PJJ adalah seringkali nilai jasa lingkungan tidak dapat terdefiniskan dengan baik, karena banyak jasa lingkungan tidak memiliki nilai pasar (*market value*).

Program PJJ yang menetapkan nilai imbal jasa lingkungan berdasarkan kesepakatan para pihak, bukan

mengacu pada valuasi ekonomi juga menjadi masalah tersendiri. Sementara itu dari sisi penyediaan jasa lingkungan, aspek yang menentukan ketersediaan jasa lingkungan sangat kompleks, baik dari aspek biofisik maupun sosial-ekonomi, sehingga faktor yang menentukan jumlah dan produksi jasa lingkungan belum tentu dipahami oleh aktor (pelaku) yang terlibat dalam PJJL.

Konsekuensinya adalah penentuan kegiatan PJJL sebagai syarat atau kondisionalitas seringkali berdasarkan asumsi bahwa kegiatan yang disepakati dalam PJJL akan berkontribusi terhadap penyediaan jasa lingkungan (asas penambahan), bukan melalui perhitungan yang akurat. Wunder (2015) merevisi definisi imbal jasa lingkungan dengan definisi yang lebih umum dan tidak terpaku kepada mekanisme transaksi ekonomi. **Pembayaran (Imbal) Jasa Lingkungan** dapat didefinisikan sebagai transaksi sukarela antara penyedia dengan pengguna jasa lingkungan yang bersifat kondisional (*berbasis kinerja yang disyaratkan*) dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam sesuai aturan yang disepakati guna menjamin ketersediaan jasa lingkungan.

Pembayaran jasa lingkungan (*Payment for Ecosystem Services*) adalah instrumen berbasis pasar untuk tujuan konservasi, berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan, harus membayar

untuk keberlanjutan penyediaan jasa lingkungan, dan siapa yang menghasilkan jasa tersebut harus dikompensasi.

Tabel 5.1 Perkembangan definisi pembayaran jasa lingkungan

Aspek PII	2005	2015
Karakteristik	Transaksi/partisipatif sukarela	Transaksi/partisipatif sukarela
Ribah penyedia	Penjual jasa lingkungan	Penyedia jasa lingkungan
Ribah pembeli	Pembeli jasa lingkungan	Pengguna/pemangsa jasa lingkungan
Aspek linear/persyarat/ kondisionalitas	Ibu dan hanya jika pembeli bisa memastikan keberadaan jasa lingkungan	Pengadaan sumber daya alam sesuai aturan yang ditetapkan
Definisi penyedia jasa lingkungan	Proses penyediaan jasa lingkungan, yaitu berserawa/gunselahan yang memastikan keberadaan jasa lingkungan, dipahami dengan baik	Tidak disebutkan
Aspek pemilikan/edisionalitas	Tidak disebutkan	Sangat menjamin keberadaan jasa lingkungan

Penyedia jasa lingkungan dalam mekanisme imbal jasa lingkungan menerima pembayaran tergantung dari kemampuan mereka menyediakan jasa lingkungan yang diinginkan atau melakukan suatu kegiatan yang sifatnya dapat menghasilkan jasa lingkungan tersebut. Beberapa prinsip dalam pelaksanaan *Payment for Ecosystem Services* adalah:

1. Transaksi bersifat sukarela. Ada kesepakatan yang tidak memberatkan dan saling mendukung antara pembeli dan penyedia jasa lingkungan
2. Jasa lingkungan telah terdefinisikan dengan baik untuk ditransaksikan
3. Minimal ada satu pembeli;
4. Minimal satu penyedia; dan

5. Jika dan hanya jika penyedia jasa lingkungan mengamankan provisi jasa lingkungan (*conditionality*) Pembayaran imbal jasa lingkungan pada prinsipnya merujuk pada konsep pembayaran jasa lingkungan (*payment for environmental services*) mengacu pada 3 (tiga) prinsip:

1. Sepanjang terkait kewajiban pelayanan publik (menyangkut hajat hidup orang banyak), Pemerintah mendanai kegiatan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (*government pay principle*). Apabila pemerintah menjadi salah satu pelaku, baik sebagai pembeli jasa atau penjual jasa, maka ada dua prinsip yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan keberlangsungan imbal jasa lingkungan adalah *transparansi* dan *akuntabilitas public*. Pemanfaatan jasa lingkungan dalam prinsip transparansi dilakukan secara terbuka dengan kewajiban menyediakan informasi kepada publik, serta publik mendapatkan akses informasi guna mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan hutan tersebut. Pemanfaatan jasa lingkungan hutan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik harus mampu mempertanggung-gugatkin kinerja dan tindakan pengelolaan kepada publik dan para pihak yang berkepentingan sesuai dengan mekanisme yang berlaku

2. Penerima manfaat atas sumber daya alam tanah dan air harus membayar untuk kepentingan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan yang secara teori ekonomi berdasarkan suatu prinsip bahwa yaitu penerima manfaat membayar (*beneficiaries pay principle*).
3. Perusak atau pencemar lingkungan harus membayar untuk kepentingan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (*polluter pay principle*). Adapun penyedia manfaat lingkungan karena dilakukannya konservasi akan mendapat insentif atau kompensasi dari biaya dari kegiatan konservasi yang telah dilakukan.

V.2 Para Pihak dalam Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan

Terdapat dua pihak utama yang terlibat dalam suatu Program Jasa Lingkungan: Penyedia Jasa Lingkungan dan Pemanfaat Jasa Lingkungan. Berdasarkan pembelajaran dari pelaksanaan Program Pembayaran Jasa Lingkungan keberhasilan dan keberlanjutan program PJJ sangat dipengaruhi oleh peran dari Lembaga Perantara Jasa Lingkungan (*intermediary*) yang memfasilitasi keberlangsungan pelaksanaan Program PJJ. Peran Perantara tentu saja dalam perkembangannya memiliki pengaruh yang besar terhadap mekanisme PJJ

Penyedia jasa lingkungan merupakan pihak yang memiliki akses, kewenangan, penguasaan dan/atau bukti

pemilikan/penguasaan terhadap bentang alam/plot/lahan yang menyediakan jasa lingkungan, serta memiliki komitmen dan kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan ketersediaan jasa lingkungan melalui pengelolaan lahan mereka. Penyedia harus dapat menjamin terlaksananya kegiatan yang berkontribusi terhadap penyediaan jasa lingkungan, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kontrak PJJ. Penyedia jasa lingkungan merupakan pihak yang diberikan kompensasi/imbalan/pembayaran untuk kinerja dan kontribusi mereka dalam upaya penyediaan jasa lingkungan. Beberapa contoh penyedia jasa lingkungan antara lain:

1. Petani maupun kelompok tani pemilik lahan di hulu DAS yang mengelola lahannya secara berkelanjutan, sehingga menjaga kualitas dan kuantitas air yang dinikmati pemangku kepentingan di hilir;
2. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk merawat dan menjaga sumber air yang dinikmati pemangku kepentingan lain;
3. Pemerintah daerah yang terletak di kawasan hulu, dan berkontribusi terhadap penghidupan daerah lain yang terletak di hilir suatu daerah aliran sungai
4. Kelompok masyarakat, petani, maupun pemerintah yang menjaga kebun campur dan hutan mereka untuk penyerapan emisi dan penyimpanan cadangan karbon,

yang ditetapkan melalui skema transaksi karbon sukarela maupun REDD

Pemanfaat jasa lingkungan merupakan pihak yang memperoleh manfaat dari jasa lingkungan yang dihasilkan dari alam atau ekosistem dengan bantuan penyedia jasa lingkungan. Pemanfaat jasa lingkungan dari pelaku usaha (sektor privat), yang dapat berupa satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang menggunakan jasa lingkungan yang sama (misalnya operator pariwisata, atau perusahaan industri di hilir yang menggunakan air dari hulu). Beberapa contoh pemanfaat jasa lingkungan antara lain:

1. Warga kota dan industri yang berlokasi di daerah hilir yang memanfaatkan air bersih dari hulu daerah aliran sungai;
2. Kegiatan industri dan komersial yang memanfaatkan air dari sumber air untuk kegiatan usaha mereka;
3. Pemerintah daerah yang terletak di kawasan hilir, yang daerahnya memanfaatkan air bersih dari daerah hulu di bawah pengelolaan pemerintah daerah lain
4. Negara maupun perusahaan yang ingin mengkompensasi emisi karbon dari kegiatan mereka. Sehingga membeli kredit karbon melalui skema transaksi karbon sukarela ataupun REDD

Lembaga Perantara Jasa Lingkungan berfungsi untuk menjembatani kepentingan para pihak, serta

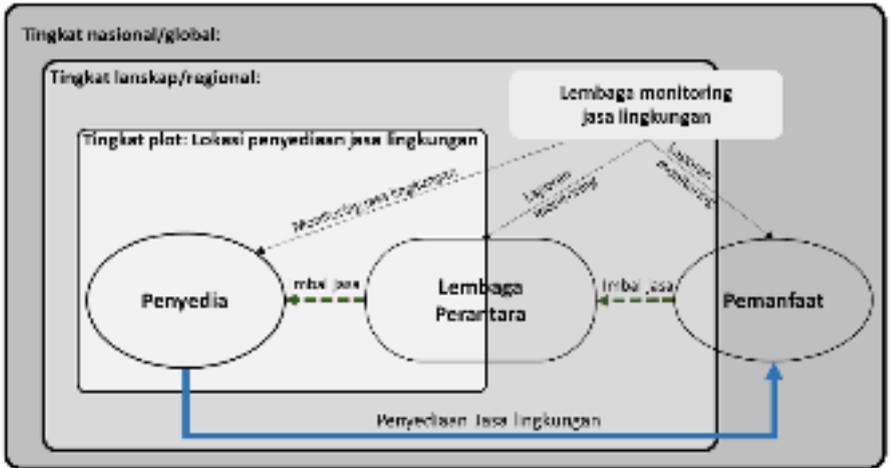
mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Program PJJ. Untuk itu, keanggotaan lembaga perantara terdiri dari perwakilan semua pihak yang berkepentingan dalam penyediaan jasa lingkungan, guna memastikan keterwakilan aspirasi, keadilan, dan transparansi program PJJ.

Bentuk lembaga perantara multi-pihak yang berperan dalam pelaksanaan PJJ dapat berupa Forum Daerah Aliran Sungai ataupun Kelompok Kerja. Idealnya lembaga perantara juga memiliki landasan hukum dari pemerintah, misalnya melalui surat keputusan bupati atau gubernur, sebagai basis pelaksanaan kegiatan mereka. Beberapa tugas dan fungsi yang diemban Lembaga Perantara antara lain (Amaruzaman *et al.*, 2017)

1. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi multi-pihak, terutama antara penyedia dan pemanfaat;
2. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait pengelolaan Jasa Lingkungan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program PJJ;
3. Mengelola dan menyalurkan dana PJJ untuk mendukung pelaksanaan program;
4. Memberikan masukan dan laporan bagi pemerintah daerah terhadap progress pelaksanaan PJJ;
5. Memfasilitasi kepentingan penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan, serta memfasilitasi penyelesaian konflik di dalam program PJJ;

6. Mengkomunikasikan pentingnya menjaga ketersediaan jasa lingkungan kepada pihak luar;
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan verifikasi kontrak jasa lingkungan **dan/atau** mengawasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan verifikasi kontrak jasa lingkungan yang dilaksanakan oleh pihak lain yang memiliki kapasitas untuk melakukan monitoring (mis. Lembaga Monitoring Jasa Lingkungan);

Beberapa faktor yang mempengaruhi pentingnya lembaga perantara di antaranya keterbatasan kapasitas sumberdaya masyarakat penyedia jasa, keterbatasan jaringan (networking) yang dimiliki penyedia jasa, dan lemahnya posisi tawar dari masyarakat penyedia. Skema pembayaran jasa lingkungan secara umum diilustrasikan dalam Gambar 5.4. Keterkaitan antar-pihak, alur dari penyediaan jasa lingkungan, serta alur dari imbalan/kompensasi jasa lingkungan terdeskripsi dalam gambaran tersebut. Kegiatan monitoring dapat dilakukan oleh Lembaga Perantara ataupun melibatkan pihak ketiga bila dibutuhkan.



Gambar 5.4. Ilustrasi keterlibatan pihak-pihak utama dalam Pembayaran Jasa Lingkungan

V.3 Penetapan Nilai Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan

Penetapan bentuk dan nilai kompensasi/imbal jasa lingkungan dilakukan berdasarkan penilaian jasa lingkungan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi Pihak Penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan. Hal ini dilakukan melalui konsultasi antara Pihak Penyedia dan Pihak Pemanfaat, melalui fasilitasi Lembaga Perantara Jasa Lingkungan.

Bentuk kompensasi/imbal jasa lingkungan dapat berupa imbalan finansial dan nonfinansial. Bentuk kompensasi yang diberikan tergantung kesepakatan para pihak dalam pembayaran jasa lingkungan.

1. Imbalan finansial

Kompensasi/imbal jasa lingkungan finansial berupa uang dalam jumlah tertentu yang diberikan langsung kepada penyedia berdasarkan kinerjanya.

2. Imbalan non-finansial

Kompensasi/imbalan non-finansial antara lain berupa sumber daya pembangunan yang bersifat fisik dan dapat dinilai langsung dengan uang, seperti pembangunan sarana dan prasarana publik, pemberian bibit, alat produksi, ternak, dan sebagainya. Beberapa kompensasi/imbal jasa lingkungan tidak selalu dapat dinilai dengan uang. Kompensasi/Imbalan non-finansial juga dapat berupa pemberian akses kepada sumber daya pembangunan yang bersifat non-fisik, seperti kegiatan peningkatan kapasitas, pendampingan, pemberian program pembangunan, serta membuka akses pasar bagi penyedia jasa lingkungan.

Kompensasi/imbal jasa lingkungan non-finansial tidak harus selalu melibatkan Pemanfaat langsung dari jasa lingkungan. Kompensasi/imbal jasa lingkungan juga dapat diberikan oleh pihak-pihak yang peduli dan mau berkontribusi (ko-investasi) terhadap penyediaan jasa lingkungan. Prinsip pengelolaan bersama atau ko-manajemen dapat diterapkan untuk mendukung penyediaan jasa lingkungan.

Kompensasi/imbal jasa lingkungan bila diberikan dalam bentuk uang, perhitungan nilai pembayaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan biaya-biaya berikut:

1. Biaya peluang (*opportunity cost*) bagi pihak penyedia jasa lingkungan apabila mereka harus mempertahankan atau merubah guna lahan mereka. Apabila peluang penerimaan yang diperoleh penyedia dari mengganti suatu guna lahan yang menyediakan jasa lingkungan lebih besar daripada penerimaan saat mempertahankan guna lahan, maka insentif atau kompensasi idealnya ditetapkan minimal sebesar selisih antara biaya peluang dengan penerimaan dari guna lahan yang dipertahankan;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan konservasi, misalnya biaya membangun perangkat sedimen, biaya pengadaaan bibit, biaya penanaman, biaya perawatan, biaya patroli, dan lain sebagainya;
3. Biaya untuk melakukan kegiatan pendukung dalam pelaksanaan kontrak jasa lingkungan, misalnya biaya untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta biaya pelatihan bagi masyarakat untuk menanam atau membuat perangkat sedimentasi;
4. Biaya operasional pelaksanaan Program kompensasi imbal jasa lingkungan , antara lain digunakan untuk membiayai pertemuan antara penyedia dan pemanfaat,

kunjungan lapangan, estimasi kuantitas dan kualitas jasa lingkungan, biaya monitoring, verifikasi, dan evaluasi, dan biaya lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kompensasi imbal jasa lingkungan.

Sebagai upaya mendapatkan nilai pembanding, pihak Pemanfaat jasa lingkungan maupun Lembaga Perantara dapat menghitung biaya manfaat dari ketersediaan jasa lingkungan. Contoh ilustrasi: suatu perusahaan pengguna air di wilayah hilir dapat menghitung biaya operasional penjernihan air yang dapat dihemat apabila mereka membayar kompensasi bagi masyarakat untuk mengurangi sedimentasi dari bagian hulu sungai. Ketersediaan sumber daya untuk membayar kompensasi/imbal jasa akan mempengaruhi rancangan program termasuk nilai riil kompensasi/imbal jasa yang akan diberikan oleh pemanfaat. Pemberian kompensasi/imbal jasa lingkungan kepada penyedia mengacu pada pencapaian penyedia terhadap indikator kinerja yang diverifikasi melalui kegiatan monitoring oleh Lembaga Perantara maupun Pihak Pemanfaat.

Beberapa contoh indikator kinerja sebagai acuan pemberian kompensasi/imbal jasa lingkungan antara lain:

- Jumlah dan jenis pohon yang ditanam dan dipertahankan per hektar lahan kompensasi jasa lingkungan;

- Jumlah peningkatan debit air di sungai;
- Jumlah penurunan sedimentasi air di sungai;
- Jumlah ketersediaan keanekaragamanhayati;
- Jumlah serapan dan cadangan karbon; dll

V.4 Beberapa Landasan Hukum tentang Imbal Jasa Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pembayaran jasa lingkungan merupakan salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang masuk dalam cakupan insentif dan disinsentif. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah dijelaskan sebagai cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup

Penerapan insentif dan/atau disinsentif kemudian dijabarkan dalam Pasal 43 ayat (3), yakni bahwa insentif dan/atau disinsentif lain diterapkan dalam bentuk: pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; pengembangan asuransi

lingkungan hidup; pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pasal 77 ayat (3) huruf c menyatakan bahwa salah satu sumber dana pembiayaan sumber daya air dapat diperoleh dari hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Pasal 80 ayat (3) menyatakan bahwa secara teknis penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembayaran jasa lingkungan pada sektor kehutanan terkait pemanfaatan kawasan hutan telah diatur dalam berbagai peraturan pemerintah diantaranya PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, PP No. 24 Tahun 2010 tentang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi masih terbatas pada hutan produksi dan hutan lindung tentang penggunaan kawasan hutan. PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang menyebutkan pembayaran merupakan salah satu dana lingkungan.

Beberapa regulasi lain dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan jasa lingkungan. Beberapa dasar hukum tersebut di antaranya adalah:

1. Peraturan Direktoratjenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam: Nomor: P. 12 /Iv-Set/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung
2. Permen Lhk P.31/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

V.5 Skema Penerapan Imbal Jasa Lingkungan

Skema imbal jasa lingkungan secara empiris dapat dilaksanakan antara penyedia dan penerima manfaat jasa lingkungan dalam kerangka *G to G (Government to Government)*, *G to C (Government to Community)*, *G to P (Government to Privat)*, *C to C (Community to Community)*, *C to P (Community to Privat)*, *P to P (Privat to Privat)* dan sebaliknya. Pihak yang dapat bertindak sebagai fasilitator dapat diperankan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah

Lembaga Swadaya masyarakat (LSM/NGO), dan juga organisasi non-profit

Contoh Kasus 1:

Pembayaran Jasa Lingkungan Air Pemerintah Daerah Cirebon

Latar belakang: PDAM Kota Cirebon mengandalkan pasokan air dari Kabupaten Kuningan untuk memasok air bersih mereka. Oleh karena itu PDAM Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan melakukan kerjasama pengelolaan sumber mata air di Desa Paniis Kabupaten Kuningan pada tahun 2009.

Skala penyediaan jasa lingkungan: Saat ini secara spesifik kerjasama Kompensasi Jasa Lingkungan difokuskan pada Desa Paniis, dikarenakan mata air utama terdapat di desa tersebut. Namun, para aktor yang terlibat dalam Kompensasi Jasa Lingkungan menyebutkan bahwa lokasi spesifik dari daerah resapan mata air yang menyediakan jasa lingkungan di Desa Paniis Kabupaten Kuningan belum teridentifikasi secara jelas

Jenis Jasa Lingkungan: Perlindungan tata air, meliputi pasokan dan kualitas air bersih.

Penyedia: Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

Pemanfaat: PDAM dan Pemerintah Kota Cirebon

Lembaga Perantara: Forum Kemitraan Kawasan Gunung Ciremai (FKKGC), dikenal juga sebagai Forum Ciremai

Indikator kinerja: Pembayaran kompensasi jasa lingkungan dilakukan oleh PDAM Kota Cirebon ke Kota Cirebon,

kemudian dana tersebut disalurkan dari Pemerintah Kota Cirebon ke Pemerintah Kabupaten Kuningan didasarkan pada jumlah m³ air yang diambil/dimanfaatkan oleh PDAM. Saat ini dana kompensasi digunakan untuk kegiatan pemeliharaan dan pelestarian sumber mata air desa Paniis kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan. Selain itu PDAM sebagai pemanfaat juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan sekitar lokasi pengambilan air dan turut menjaga memelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar mata.

Dana kompensasi disalurkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan melakukan penanaman pohon di lahan desa

Konsep pembayaran jasa lingkungan telah dipraktikkan di beberapa daerah di Indonesia dalam berbagai kerangka. Dalam kerangka G to G misalnya, hal ini dipraktikkan oleh Pemerintah Daerah Kuningan dan Cirebon. Kuningan merupakan wilayah hulu yang menjadi sumber penyediaan air bagi wilayah hilir salah satunya di wilayah Cirebon.

Dasar perjanjian pembayaran jasa lingkungan ini adalah **nota kesepahaman** antara FKDC dengan PT KTI dengan dilandasi azas kesukarelaan (*voluntary agreement*) untuk memelihara ekosistem (lingkungan) Daerah Aliran Sungai Cidanau dan ditujukan untuk mendorong percepatan upaya rehabilitasi ekosistem (lingkungan) dengan objek perjanjian adalah produk jasa lingkungan dalam bentuk sumber daya air yang dihasilkan oleh Daerah Aliran Sungai Cidanau.

FKDC dan PT. Krakatau Tirta Industri (KTI) membuat kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembayaran Jasa Lingkungan, dengan jangka waktu untuk 5 (lima) tahun (2005-2009). Kesepakatan penting tersebut antara lain; KTI menunjuk FKDC sebagai lembaga yang mewakili kepentingan KTI sebagai buyer di masyarakat yang telah ditetapkan sebagai produsen jasa lingkungan (*seller*) di hulu DAS Daerah Aliran Sungai Cidanau, KTI secara sukarela (*voluntary*) membayar jasa lingkungan atas pemanfaatan sumber daya air Daerah Aliran Sungai Cidanau.

Pihak FKDC (sebagai fasilitator dari PT KTI) membayarkan jasa lingkungan kepada pihak kelompok tani sebesar Rp 1.200.000 per hektar per tahun selama masa kontrak (5 tahun). Pihak kelompok tani bersedia membangun dan memelihara hutan dengan tanaman jenis kayu-kayuan dan jenis buah-buahan. Jenis tanaman yang memberi jasa lingkungan adalah semua jenis tanaman kehutanan termasuk tanaman *multi-*

purpose trees species (MPTS) berdasarkan ketentuan kehutanan & perkebunan kecuali jenis kayu jenis polong-polongan

Contoh Kasus 2:

Mekanisme Kompensasi Jasa Lingkungan Perlindungan Tata Air yang sudah berjalan di Indonesia antara lain oleh Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram

Latar belakang: Eskalasi kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS Jangkok di Kabupaten Lombok Barat mempengaruhi pasokan air dari wilayah hulu yang dimanfaatkan PDAM Giri Menang untuk melayani daerah perkotaan di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Masyarakat yang tinggal di daerah hulu sebagian besar berada pada tingkat sosial-ekonomi yang lemah yang mendorong mereka untuk melakukan degradasi lingkungan di wilayah hulu DAS Jangkok. Terbatasnya kapasitas dan sumberdaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan membuat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengadopsi skema Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan.

Skala penyediaan jasa lingkungan: *Cekungan air tanah DAS Jangkok, Kabupaten Lombok Barat dengan wilayah hulu berada di Kabupaten Lombok Barat dan wilayah hilir berada di Kota Mataram.*

Jenis Jasa Lingkungan: *Perlindungan tata air, meliputi pasokan dan kualitas air bersih.*

Penyedia: Empat Kelompok Petani Jasa Lingkungan yang mencakup desa-desa di wilayah Hulu DAS Jangkok yang mengajukan proposal penyediaan jasa lingkungan yang meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemanfaat: PDAM Giri Menang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

Lembaga Perantara: Institusi Multi-Pihak (IMP) yang merupakan badan independen mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam pengelolaan jasa lingkungan di Kabupaten Lombok Barat. Keanggotaan IMP terdiri dari berbagai pihak perwakilan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, LSM, Pihak Swasta, PDAM, masyarakat dan perusahaan pengelola air

Kegiatan dan Indikator kinerja: Terlaksananya kegiatan yang diajukan masyarakat melalui proposal jasa lingkungan, meliputi kegiatan restorasi dengan system agroforestry, pembibitan pohon, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Skala waktu Perjanjian Kerjasama Jasa Lingkungan relatif pendek (empat bulan hingga satu tahun), dan setiap tahun kelompok dari desa yang berhak mendapatkan dana kompensasi jasa lingkungan dapat berubah berdasarkan

persetujuan proposal jasa lingkungan yang diajukan kepada IMP.

Lembaga monitoring dan evaluasi: Kegiatan monitoring evaluasi serta penyaluran dana kompensasi/imbal jasa lingkungan dilakukan oleh Institusi multi-pihak pada kurun waktu yang disepakati di perjanjian kerjasama, antara lain dalam kurun waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan sejak perjanjian ditetapkan.

Kendala yang dihadapi: Karena dana jasa lingkungan dari PDAM masuk ke kas daerah Kabupaten lombok barat maka diperlukan mata anggaran khusus untuk pengelolaan dana jasa lingkungan sehingga dapat memudahkan IMP dalam mengelola dan menarik dana jasa lingkungan dari kas daerah dan menyalurkannya ke kelompok tani

Pembelajaran: Peran lembaga perantara (IMP) sangat penting karena selain sebagai perantara antara penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan, IMP juga merupakan penggerak kegiatan konservasi jasa lingkungan. Selain itu IMP juga aktif untuk mencari pemanfaat lain yang berminat untuk bergabung dalam kegiatan pengelolaan jasa lingkungan di kabupaten Lombok Barat.

Kajian ilmiah yang dilakukan oleh berbagai instansi termasuk universitas menjadi pendukung kegiatan konservasi jasa lingkungan di Lombok Barat seperti identifikasi skala spasial sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi lokasi

konservasi yang merupakan lokasi penyedia jasa lingkungan. Selain itu penelitian/survey terhadap kesediaan pembayaran jasa lingkungan beserta nilai besarnya juga telah dilakukan sehingga dapat mengetahui kesediaan pemanfaat untuk ikut terlibat dalam pembayaran jasa lingkungan.

Diagram Skema Imbal Jasa Lingkungan



Gambar 5.6 Skema Pembayaran Jasa Lingkungan (kasus air)
Jasa Lingkungan dalam Bentuk Ekowisata

Kawasan hutan dikenal memiliki fungsi sebagai daerah resapan air, sumber kayu dan merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air, kesuburan tanah, juga memiliki potensi wisata alam yang cukup besar dan patut dikembangkan. Objek wisata alam yang berada di dalam kawasan hutan dapat dikembangkan melalui pemanfaatan jasa lingkungannya. Pemanfaatan ini harus dilakukan dengan tetap

memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.

Pengembangan potensi wisata ini dengan mengacu pada PP Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan pasal 25 ayat (1) pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dan pasal 33 ayat (1) pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi antar lain melalui kegiatan usaha :

- a. Pemanfaatan aliran air
- b. Pemanfaatan air
- c. Wisata alam
- d. Perlindungan keanekaragaman hayati
- e. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan
- f. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon

Ekowisata merupakan bentuk upaya pelestarian keindahan alam dan pariwisata. Kegiatannya bertujuan untuk menjaga kondisi alam yang memberikan manfaat estetika, pendidikan, pengetahuan, religi, budaya, serta rekreasi

Pengembangan ekowisata memungkinkan penerapan PJJ baik secara langsung antara wisatawan sebagai pembeli maupun pribadi/kelompok yang menyediakan jasa wisata. Keterlibatan Lembaga perantara memungkinkan diterapkan dalam imbal jasa lingkungan dalam ekowisata. Keberlangsungan PJJ melalui mekanisme ekowisata lebih banyak tergantung pada

mekanisme harga pasar yang berkaitan dengan *willingness to pay* dari wisatawan dan seberapa besar kemampuan penyedia jasa lingkungan memberikan *willingness to service*.

V.6 SIMPULAN

Jasa lingkungan didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh stakeholders. Imbal jasa lingkungan merupakan instrumen berbasis pasar untuk tujuan konservasi, berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan, harus membayar untuk keberlanjutan penyediaan jasa lingkungan, dan siapa yang menghasilkan jasa tersebut harus dikompensasi. Diperlukan pengembangan mekanisme imbal jasa lingkungan yang dapat secara komprehensif diterima oleh berbagai pihak

Soal-soal:

1. Berikan penjelasan tentang contoh jasa lingkungan dan bagaimana proses penerapan imbal jasa lingkungannya
2. Bagaimana peran para pihak yang terkait dalam proses imbal jasa lingkungan
3. Bagaimana metode dalam menentukan kegiatan apa saja yang dapat dikenai imbal jasa lingkungan
4. Berikan uraian dan contoh mekanisme penerapan imbal jasa lingkungan

Tugas review jurnal tentang jasa lingkungan dan imbal jasa lingkungan minimal dari 1 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional

VI. LAHAN BASAH SEBAGAI PENYEDIA JASA LINGKUNGAN DAN EKOWISATA

Tujuan Pembelajaran Mata Kuliah:

1. Mahasiswa mampu menganalisis jasa lingkungan dan potensi ekowisata di lahan basah
2. Mahasiswa mampu menguraikan berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya dan lahan basah

VI.1 Sumberdaya lahan basah sebagai penyedia jasa lingkungan

Lahan basah dalam Konvensi Ramsar (1971) merupakan daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan; alami atau buatan; tetap atau sementara; dengan air yang tergenang atau mengalir; tawar, payau, atau asin; termasuk wilayah laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu air surut. Berbagai formasi vegetasi hutan di lahan basah di antaranya seperti hutan rawa gambut, hutan rawa lebak, hutan rawa pasang surut, hutan pantai, hutan rivarian, dan hutan mangrove.

Formasi vegetasi hutan basah memiliki manfaat langsung bagi manusia seperti penghasil kayu, hasil hutan bukan kayu (getah, rotan, madu, tanaman sebagai sumber karbohidrat), satwa, dan mikroorganisme (jamur, bakteri). Manfaat tidak langsungnya bagi manusia dapat berupa jasa lingkungan, baik

sebagai pengatur tata air, fungsi estetika, maupun sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon.

Penyerapan karbon sendiri terjadi didasarkan atas proses kimiawi dalam aktivitas fotosintesis tumbuhan yang menyerap CO₂ dari atmosfer dan air dari tanah menghasilkan oksigen dan karbohidrat yang selanjutnya akan berakumulasi mejadi selulosa dan lignin sebagai cadangan karbon.

Berbagai jenis tumbuhan alami di lahan basah dapat berperan sebagai penyedia jasa lingkungan, tetapi tidak semua juga berperan sebagai sumber pangan. *Metroxylon sagu* menjadi salah satu tumbuhan unggulan di lahan sagu yang memiliki peran penting dalam penyedia jasa lingkungan sekaligus sebagai sumber pangan potensial.

Pengembangan obyek daya tarik wisata di lahan basah pada tahap awal dapat dilakukan dengan menganalisis potensi suatu kawasan. Direktorat Jenderal PHKA tahun 2003 telah mengeluarkan suatu pedoman dalam Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA). Beberapa kriteria penilaian yang digunakan di antaranya adalah: kriteria daya tarik, kriteria aksesibilitas, kriteria sarana dan prasarana penunjang. Konsep penerapan ekowisata yang terpenting adalah ketika obyek daya tarik wisata tidak hanya terfokus pada pemandangan alam, tetapi unsur pendidikan tentang lingkungan biofisik dan budaya juga harus ditonjolkan. *M.sagu* yang terdapat di lahan basah selain bermanfaat

memberikan jasa lingkungan (environmental services) dan penyedia pangan, juga dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk pengembangan ekowisata.

VI.2 *Metroxylon sagu* di lahan basah Kalimantan Selatan

Metroxylon sagu di Kalimantan Selatan terutama tersebar di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *M.sagu* tumbuh di tanah-tanah alluvial yang berada di tepian sungai besar, sungai kecil dan saluran air. Beberapa tegakan sagu dalam patches kecil ditemukan di daerah cekungan (guntung dalam istilah Bahasa Banjar) dan umumnya berdekatan dengan persawahan.

M.sagu di Kalimantan Selatan tumbuh sebagai hutan alam monokultur atau membentuk tegakan murni. Peran lingkungan dari tegakan ini di wilayah tepian sungai adalah menjaga abrasi sungai. Tegakan *M.sagu* ini dapat diklasifikasikan sebagai hutan rivarian (Rivarian Forest).



Gambar 6.1 Tegakan *M.sagu* di Kalimantan Selatan

Beberapa jasa lingkungan lain yang teridentifikasi adalah tegakan *M.sagu* sebagai habitat satwa. Potensi tegakan *M.sagu* tingkat pohon (diameter >20 cm) relatif tinggi, studi kasus di Kabupaten Banjar potensinya mencapai 396 batang/ha dengan rata-rata volume per batang 1.37 m³ dan volume batang/ha 543 m³/ha. Potensi biomassa ini penting nilainya bila dihubungkan dengan total cadangan karbon tersimpan. Keberadaan tegakan *M.sagu* mampu mempertahankan karbon tersimpan dalam bentuk biomasa. Penelitian ini didukung dengan analisis geospasial, sehingga hasilnya cukup akurat



Gambar 6.2 Hasil analisis spasial sebaran tumbuhan *M.sagu* *M.sagu* dimanfaatkan masyarakat Kalimantan Selatan terutama untuk pakan ternak, bahan atap rumah (atap rumbia). Akar tanaman sagu dapat digunakan untuk pengobatan sakit perut. Tepung sagu dapat digunakan sebagai obat oles

penyakit campak. Bagian ujung batang sagu juga digunakan sebagai sumber panganan masyarakat (umbut sagu). Sisa kulit sagu biasanya dapat digunakan sebagai bahan lantai dan dinding pondok.

Pemanfaatan *M.sagu* sebagai penghasil tepung sagu sangat terbatas di wilayah tertentu saja. Berdasarkan sebaran tumbuhan sagu, produksi tepung sagu hanya terdapat di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan Kecamatan Candi Laras Selatan Tapin. Produksi tepung sagu terbanyak berada di kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Keterbatasan penguasaan teknologi, peralatan pengolahan dan rendahnya potensi *M.sagu* suatu wilayah menjadi pemicu sedikitnya usaha pembuatan tepung sagu.

Buah sagu tidak begitu familiar bagi generasi sekarang di Kalimantan Selatan. Buah sagu pada masa lalu merupakan panganan masyarakat. Rasanya kelat manis, biasanya dimakan sebagai bagian buah untuk rujak buah



Gambar 6.3 Buah sagu yang dapat dikonsumsi



Gambar 6.4. Pemanfaatan dari bagian kulit *M.sagu*



Gambar 6.5 Pemanfaatan daun *M.sagu*



Gambar 6.6. Pemanfaatan batang sagu sebagai pakan ternak ***Metroxylon sagu* Rottb: Penyedia Jasa Lingkungan**

Metroxylon sagu Rottb dikenal sebagai tanaman penghasil pati sagu. Indonesia memiliki areal sagu terluas di dunia Sagu merupakan tanaman C3 yang dapat hidup pada lahan marginal seperti di lahan gambut, rawa dan tanah yang tergenang

Menurut Adeni *et al.* (2010) sagu dapat karena sagu mampu memproduksi oksigen sebanyak 9.52 ton/ha hutan sagu dan dapat mengurangi pemanasan global. Tanaman sagu dapat menjaga tata air di sekitarnya. Peran sagu sebagai menjaga tata air telah di prediksi Stanton (1996) yang menjelaskan bahwa tanaman sagu dapat menjaga tata air. Sitaniapesy (1996) menjelaskan bahwa di dalam tanah perakaran tanaman sagu akan menyerap air dan hara mineral. Anakan tanaman sagu pada kawasan tergenang terpusat pada lapisan permukaan tanah dan bahkan pada ketinggian 1 m batang di permukaan dipenuhi akar dan sering muncul anakan sagu.

Haska *et al.* 2007. kemampuan penyerapan CO₂ dimana untuk tanaman sagu memiliki nilai 240 ton CO₂ /ha/th, jagung 216 ton CO₂ / ha/th, padi 81 ton CO₂ /ha/th; ubi kayu ton CO₂ /ha/th, tebu 225 ton CO₂ /ha/th dan ubi jalar 88 ton CO₂ /ha/th. Tanaman sagu dibanding tanaman pangan lain memiliki kemampuan menyerap CO₂ lebih besar.

Tanaman penghasil karbohidrat dari biji-bijian sangat rentan terhadap kekeringan dan banjir, sedangkan tanaman sagu dapat beradaptasi dengan genangan air dan kekeringan. Hasil penelitian Kissinger dan Pitri (2021) mengemukakan bahwa sagu dapat tumbuh dan berkembang di lahan yang tergenang atau kering. Kemampuan adaptasi dari tanaman sagu sangat potensial berperan sebagai cadangan simpanan karbon dan

menjaga kestabilan iklim. Adeni *et al.* (2010) mengungkapkan bahwa tanaman dapat mengurangi pemanasan global.

VI.3 *Metroxylon sagu* Rottb. sebagai Sumber Pangan

M.sagu merupakan salah satu produk hasil hutan bukan kayu yang saat ini sedang dikembangkan pemanfaatannya. Pemanfaatan tanaman sagu sebagai bahan pangan juga dapat mengatasi masalah kekurangan pangan nasional dan dapat mengurangi ketergantungan sebagian masyarakat Indonesia terhadap beras. Nilai kalori dan gizi sagu tidak kalah dengan sumber pangan lainnya. Oleh karena itu, memposisikan sagu sebagai komponen dalam membangun ketahanan pangan nasional yang tangguh merupakan langkah strategis yang berimplikasi jauh ke depan (Bintoro, 2007).

Kandungan karbohidrat di dalam pati sagu sangat tinggi, Bintoro (1999) menyatakan bahwa kandungan karbohidrat pati sagu lebih tinggi dari pada beras. Sagu merupakan sumber karbohidrat terbesar di dunia karena dapat menghasilkan 200-400 kg pati kering per batang, bahkan aksesori sagu Para di Sentani, Papua dapat menghasilkan 975 kg pati kering per batang (Bintoro et al., 2010). Ketersediaan sagu yang berlimpah dapat digunakan sebagai upaya untuk membantu menyelesaikan masalah pangan dunia.

Ishizaki (1996) melaporkan bahwa tanaman sagu memiliki peranan penting dalam penyediaan karbohidrat dengan produktifitas pati 10-15 ton/ha/th, sedangkan pati dari padi

hanya 3 ton/ha/th; jagung 5 ton/ha/th, kentang 2.5 ton/ha/th; ubikayu 5-6 ton/ha/th dan ubi jalar 5,5 ton/ha/th. Sagu juga dapat menghasilkan bioetanol sekitar 8,000- 10,000 L/ha/tahun (Adeni *et al.* 2010)



Gambar 6.8. Potongan batang M.sagu yang siap di olah menghasilkan tepung sagu



Gambar 6.9. Pati sagu yang dihasilkan

Pati sagu yang dihasilkan di Kalimantan Selatan terutama wilayah kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan berupa sagu basah. Beberapa grade sagu dihasilkan dari industry kecil masyarakat pengolah sagu. Masing-masing grade tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan.

Tabel berikut menjelaskan produksi pati sagu yang dihasilkan beberapa wilayah di Indonesia (2016-2020).

Tabel 6.1 Produksi pati sagu beberapa wilayah di Indonesia

No.	Provinsi/Province	Produksi (Gross)					Perubahan/ Growth 2018 over 2017 (%)
		2016	2017	2018	2019 ^(*)	2020 ^(**)	
1	Aceh	1,287	1,711	1,746	1,745	1,781	2.02
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	0.00
3	Sumatera Barat	-	-	1,723	1,725	1,781	0.00
4	Riau	328,758	328,728	354,268	359,359	374,815	7.53
5	Kepulauan Riau	3,540	3,571	3,264	4,487	4,520	-5.00
6	Jawa	-	-	-	-	-	0.00
7	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	0.00
8	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	0.00
9	Bengkulu	-	-	-	-	-	0.00
10	Lampung	-	-	-	-	-	0.00
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	0.00
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	0.00
13	Banten	-	-	-	-	-	0.00
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	0.00
15	DI. Yogyakarta	-	-	-	-	-	0.00
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	0.00
17	Bali	-	-	-	-	-	0.00
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	0.00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	0.00
20	Kalimantan Barat	210	308	308	308	314	0.00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	0.00
22	Kalimantan Selatan	4,150	4,130	4,045	4,175	4,229	-2.08
23	Kalimantan Timur	3	3	4	3	3	33.33
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	0.00
25	Sulawesi Utara	-	-	2,145	2,145	2,180	0.00
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	0.00
27	Sulawesi Tengah	528	705	504	587	507	28.18
28	Sulawesi Selatan	3,059	3,073	3,136	2,984	3,026	2.05
29	Sulawesi Barat	608	606	607	554	566	-8.56
30	Sulawesi Tenggara	2,755	2,600	2,710	2,654	2,658	4.24
31	Maluku	9,370	8,134	8,167	8,927	9,118	0.29
32	Maluku Utara	1,174	1,174	589	688	702	-42.87
33	Papua	28,578	68,593	65,234	68,323	67,079	2.42
34	Papua Barat	1,520	1,520	1,857	1,571	1,824	9.01
Indonesia		388,813	482,918	483,642	486,488	472,886	7.07

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel 1. Provinsi Kalimantan Selatan berada di posisi ke empat daerah yang menghasilkan produk sagu tertinggi di Indonesia. Produksi tersebut dapat ditingkatkan mengingat potensi *M.sagu* yang terdapat di Kalimantan Selatan jauh lebih besar dari hasil produksi yang terdapat dalam Tabel 1.

Ekowisata Hutan *Metroxylon sagu*

Ekowisata: sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (The International Ecotourism Society, 2000). Indonesian Ecotourism Network (1996) ekowisata dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, yang secara ekonomi berkelanjutan, dan mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Mengenal ekologi sagu menjadi salah satu bentuk ekowisata yang dapat dikombinasikan dengan ekowisata susur sungai. Berbagai fauna yang menjadi tegakan *M.sagu* sebagai habitatnya juga menjadi obyek tujuan wisata yang dapat dikembangkan. Berbagai edukasi dari alam dapat dinikmati serta dapat berkontribusi dalam menambah income

masyarakat dalam menyediakan fasilitas perjalanan dan keperluan lain dalam ekowisata.



Gambar 6.10. Proses pembuatan sago tradisional dapat menjadi obyek daya tarik wisata

Selain unsur biologi, fisik dan sosial budaya, ekowisata juga dapat menawarkan unsur pendidikan seperti karakteristik ekologi dari tegakan *M.sagu* mulai dari fase hidup, manfaat tanaman, karakteristik lahan dan lain-lain



Gambar 6.11. Kawasan hutan *M.sagu* sebagai eduwisata

Unsur budaya terkait pemanfaatan *M.sagu* juga dapat menjadi obyek destinasi wisata seperti pengolahan atap daun rumbia. Pemberian pakan alami dari batang sagu untuk pakan ternak juga dapat dioptimalkan sebagai upaya diversifikasi ekowisata berbasis lahan basah

VI.4 SIMPULAN

Lahan basah merupakan sumberdaya alam dan kawasan yang berkontribusi terhadap kehidupan ekologi, ekonomi dan sosial. Jasa lingkungan dan penyedia pangan menjadi isu sentral dari pengembangan lahan basah. Penilaian jasa lingkungan dan penyedia pangan dapat didekati dengan mengkaji komunitas secara menyeluruh atau berdasarkan perspektif spesies tertentu. *Metroxylon sagu* menjadi salah satu contoh dari jasa lingkungan dan penyedia pangan yang dapat diperoleh dari suatu lahan basah

Soal-soal:

1. Jelaskan Obyek Daya Tarik Wisata di lahan basah yang juga berperan dalam jasa lingkungan
2. *M.sagu* merupakan salah satu contoh jenis tumbuhan yang potensial pengembangan ekowisata. Coba anda berikan minimal contoh dua sumberdaya alam lain yang juga dapat dikembangkan sebagai ODTWA sekaligus penyedia jasa lingkungan yang penting di lahan basah.
3. Berkaitan dengan soal nomor 2, indicator-indikator apa saja yang anda gunakan dalam menentukan suatu sumberdaya alam dapat dikembangkan sebagai ODTWA, penyumbang jasa lingkungan dan sebagai sumber pangan.

Buatlah tulisan tentang potensi ekowisata dan jasa lingkungan lahan basah. (tulisan bisa dari pengamatan langsung, tinjauan jurnal dan data pemerintahan lainnya)

DAFTAR PUSTAKA

- Acreman M.C., J.O. Mounford. 2010. *Wetland Management*. In R.C. Ferrier and A. Jenkins. *Handbook of Catchment Management*. A John Wiley & Sons, Ltd. P 19-49.
- Alfonfs, J.B dan Rivaie, A.A. 2011. Sagu Mendukung Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim, *Perspektif* Vol. 10 No.2 /Des 2011. Hlm 81 – 91 ISSN: 1412-8004
- Amaruzaman, S., Rahadian, N., Leimona, B., 2017. Role of intermediaries in the Payment for Environmental Services Scheme: Lessons learnt in the Cidanau watershed, Indonesia. In: Namirembe, S., Leimona, B., van Noordwijk, M., Minang, P. (Eds.), Co-investment in ecosystem services: global lessons from payment and incentive schemes. World Agroforestry Centre (ICRAF), Nairobi, Kenya, p. 15p
- Arnstein, S.R. 1969. *A Ladder Citizen Participation*. Diakses pada 30 Maret 2016. Tersedia pada: <http://litgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>.
- Andersson, E., McPhearson, T., Kremer, P., Gomez-Baggethun, E., Haase, D., Tuvendal, M., Wurster, D., 2015. Scale and context dependence of ecosystem service providing units. *Ecosystem Services* 12, 157-164
- Anggraini, Dewitri. 2017. Analisis Hubungan Komplementer Dan Kompetisi Antar Destinasi Pariwisata (Studi Kasus: 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Di Indonesia). Tesis MPKP FEB UI
- Anwas, Oos. M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta.

- Ardiwidjaja, R. 2006. Pariwisata Budaya, Mengapa Tidak Sekarang?, www.budpar.go.id/filedata/747_88-pariwisatabudaya.pdf [Agustus 2009]
- Bappenas, 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Perpres No 2 Tahun 2015. Jakarta
- Bintoro, M.H., N. Mashud, dan Novianto, H. 2007. *Status teknologi sagu*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Sagu di Indonesia. Batam.
- Bintoro. 2008. *Bercocok Tanam Sagu*. 71hal. Bogor: IPB Press
- Bintoro, M.H., M.Y.J. Purwanto, S. Amarillis. 2010. *Sagu di Lahan Gambut*. IPB press. Bogor. 169 hal.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2016. Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) Tahun 2016. BPS Pusat, Jakarta.
- Braat, L.C., de Groot, R., 2012. The ecosystem services agenda: Bridging the worlds of natural science and economics, conservation and development, and public and private policy. *Ecosystem Services* 1, 4-15
- Buhalis, D. 2000. Marketing the competitive destination of the future. *Tourism Management, Vol.21(1), pp.97-116*
- Buyken, A. E., Y. Kerllerohoff, S. Hahn, A. Kroke, dan T. Remer. 2006. Urinary C-peptide Excretion in Freellving Healthy Childrenis Related to Dietary Carbohydrate Intake But Not to The Dietary Glycemic Index, *J Nutr* 136(7);1628-183
- Chafid Fandeli., Mukhlison. 2020. *Pengusahaan Ekowisata*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Christie, M., Fazey, I., Cooper, R., Hyde, T., Deri, A., Hughes, L., Bush, G., Brander, L., Nahman, A., de Lange, W., 2008. An Evaluation of Economic and Non-economic

Techniques for Assessing the Importance of Biodiversity to People in Developing Countries. Defra, London.

Coles, T. 2006. Suggestions For Developing Tourism in The Wakatobi Islands. Operation Wallacea Trust Project

Costanza, R., d'Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R.V., Paruelo, J., 1997. The value of the world's ecosystem services and natural capital. *nature* 387, 253-260.

Costanza, R., de Groot, R., Braat, L., Kubiszewski, I., Fioramonti, L., Sutton, P., Farber, S., Grasso, M., 2017. Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do we still need to go? *Ecosystem Services* 28, 1-16.

Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I., Farber, S., Turner, R.K., 2014. Changes in the global value of ecosystem services. *Global environmental change* 26, 152-158

de Groot, R., Fisher, B., Christie, M., Aronson, J., Braat, L., Gowdy, J., Haines-Young, R., Maltby, E., Neuville, A., 2010. Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. In: Kumar, P. (Ed.), *The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations*. EarthScan, London and Washington

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia. 2009. Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat. Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia. Jakarta

Epler Wood, M (1999) *The Ecotourism Society'-an international NGO committed to sustainable*

development. Tourism Recreation Research 24, 199-123

- Food Agriculture Organization (FAO). 2008. *Scooping Agriculture – Wetland Interaction Towards A Sustainable – Multiple Response Strategy*. FAO. Rome
- Flach, M. 1983. *Sago Palm Domestication, Explantation, and Production* FAG Plant Production and Protection Paper. 85 pp
- Gunawan, H., Rachim, S., Sihombing, V.S., Rianti, A., Setio, P., 2015. Sistem Monitoring dan Evaluasi Keanekaragaman Hayati di Taman Kehati. Forda Press, Bogor.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Hamlan Ihsan, Nadra Khairiah, Rufida. 2018. Karakteristik Sifat Fisik dan Kimia Edible Film Pati Sagu Rumbia (*Metroxylon sagu* Rottb) untuk Bahan Baku Cangkang Kapsul. Jurnal Riset Industri Hasil Hutan Vol.10, No.2, Desember 2018: 55 – 62
- Haska N, H. Pranamuda dan Y. Yamamoto. 2007. Karakteristik Fotosintesis dan Serapan CO₂ dari Palma Sagu (*Metroxylon sagu*, Rottb). Prosiding Lokakarya Pengembangan Sagu di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Kagungan, D., & Yulianti, D. (2019). The synergy among stakeholders to develop Pisang Islandas marine tourism: The case of underdeveloped area. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 32(1), 16-23
- Hasibuan, M. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi. Aksara, Edisi Revisi.

- Ishizaki, A. 1996. Sago: The Future Source of Food and Feed. Closing Remark: In Christine Jose and Aslim Rasyid (eds). Proc.Of the Sixth. Intl. Sago Symp. Pekanbaru. Indonesia
- Kumar, R , S. S. Gill dan P. Kunasekaran 2012. Tourism as a Poverty Eradication Tool for Rural Areas in Selangor, Malaysia. *Global Journal of Human Social Science*. 12(7): 21-26
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2018. Production Area by Province in Indonesia, 2017–2021. Directorate General of Estate. [https://www.pertanian.go.id/home/index.php? show= repo&fileNum=220](https://www.pertanian.go.id/home/index.php?show=repo&fileNum=220)
- Kissinger dan Pitri RMN. 2021. Distribusi Spasial dan Potensi Tegakan Metroxylon sagu Rottb sebagai Sumber Pangan. Laporan Penelitian Dosen Wajib Meneliti. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. tidak dipublikasikan
- Louhenapessy, J.E. 2006. *Potensi dan Pengolahan Sagu di Maluku*. Makalah di Sampaikan pada Lokakarya sagu dengan tema Sagu dalam Revitalisasi Pertanian Maluku. Ambon 29-31 Mei 2006 (in Indonesia).
- Liu, A. 2006. Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia. *Tourism Management* 27 (2006): 878-889
- Lynn N.A. dan D.B. Brown. 2003. Effect of Recreational Use Impacts on Hiking Experiences in Natural Area. In Jogn Rodiek (Ed) *Landscape and Urban Planning*. *International Journal of Landscape, Ecology, Planning and Design*, 64 (1-2) : 77-87
- Manning, C., Effendi, T.N., 1991. *Urbanisasi, Pengangguran, dan sektor informal di Kota*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L.J., 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Press

- Millennium Ecosystem Assessment, 2005. *Ecosystems and Human Well-being: a Framework for Assessment*. Millennium Ecosystem Assessment, Washington DC
- Nasikun. 1997. *Model Pariwisata Pedesaan. Permodelan Pariwisata Pedesaan untuk Membangun Pedesaan yang berkelanjutan*. Bandung: ITB
- Nurlestari, Y. 2000. *Perencanaan Strategis Pengembangan Agribisnis Sagu Terpadu di Pulau Siberut*. Tesis Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB. Bogor.
- Nugroho, I. 2010. Pengembangan Ekowisata dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta. Edisi 01 tahun 2010. 65-76.
- Nugroho, I. 2011. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 362p.
- Nugroho, I. dan P. D. Negara. 2015. *Pengembangan Desa Melalui Ekowisata*. Era Adicitra Intermedia, Solo. 281p
- Nugroho, I. dan R. Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. LP3ES, Jakarta.
- Parks T, H., T. A. Parks and C. Allen. 2009. The Development of a Framework for Studying Ecotourism. *International Journal of Management*. 26(1): 89-97
- Pitana, I.G., 1999a. “*A Community Management dalam Pembangunan Pariwisata*” *Majalah Ilmiah Pariwisata- Analisis Pariwisata* Vol. 2. Program Studi Pariwisata. Universitas Udayana.
- Pitana, I.G., 2002. “*Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Bali dalam Pembangunan Pariwisata. Pada Seminar Nasional Pariwisata Bali the Last or the Lost Paradise*”. *Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan*. Denpasar: Universitas Udayana

- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
- Pokja Wasantara. 2010. *Konsep Wawasan Nusantara*. Pokja Wasantara. Lemhannas, Jakarta
- Purnomowati, W., I. Nugroho dan P. D. Negara. 2012. *Entrepreneurship Ability On Ecotourism Services Of Local People In Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Malang Regency, East Java, Indonesia*. 11th International Entrepreneurship Forum (IEF) Conference Entrepreneurship and Sustainability. Kuala Lumpur, Malaysia. 3-6 September 2012. Conference Proceeding. Volume 2, 458-473.
- RLPS, D., 2009. Peraturan Dirjen RLPS No 04/2009 tentang *Pedoman Monitoring dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai*. Dirjen RLPS Kementerian Kehutanan, Jakarta
- Rothberg, D. 1999. *Enhanced and Alternative Financing Mechanisms Strengthening National Park Management in Indonesia*. NRMP USAID, Jakarta RPJMN 2015-2019.
- Sacafirmansyah, 2009. *Partisipasi Masyarakat*. <https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>.
- Sarathong, W and K. Chanchaoenchai. 2011. *Tourists' behaviour in Thai homestay business*. International Journal of Management Cases. Special Issue. (15): 112-126
- Scheyvens, Regina. 2002. *Tourism for Development: Empowering Communities*. Singapore: Pearson Education Limited
- Sitaniapesy (1996). *Sagu : Suatu Tinjauan Ekologi*. Prosiding Nasional Sagu III. *Potensi Sagu Dalam Usaha Penembangan Agribisnis Di Wilayah Lahan Basah*. Unri Riau-Pemda Tk I Riau dan BPPT. Pekanbaru. Riau

- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Stanton R, 1996. The Role of AgroForestry and Non Cereal Agricultural in Meeting Future Staple Carbohydrate Food Need of The People of Souteast Asia.Sago: The Future Source Of Food And Feed. Sixth International Sago Symposium. Editor : Jose Christine and Aslim Rasyad. Riau University Training Center. Pekanbaru. Riau. Indonesia
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Suryana, A. 2007. *Arah dan Strategi Pengembangan sago di Indonesia*. Makalah di sampaikan pada Lokakarya Pengembangan Sagu Indonesia. Batam, 25-26 Juli 2007
- Syakir, M., Elna, M. 2013. Potensi Tanaman Sagu (*Metroxylon* spp.) Sebagai Bahan Baku Bioenergi. *Jurnal Perspektif*. Vol.12, No.2:57-64.
- Tarigan DD. 2001. *Sagu Memantapkan Sumber Swasembada Pangan*. Warta Litbang Pertanian Prosiding Sagu untuk Ketahanan Pangan. Manado: Balitka Manado; 2001. p.23(5):1-3.
- TEEB, 2010. The economics of ecosystems and biodiversity: ecological and economic foundations. UNEP/Earthprint.
- Tumbel N. 2014. Uji Kinerja Alat Pengolah Sagu Baruk (*Arenga Microcarpa*). *Jurnal Penelitian Teknologi Industri* Vol. 6 No. 1 Juni 2014: 43-54
- UNDP, 2009. Handbook for Planning, Monitoring and Evaluating for Development result. United Nation Development Programes, New York

- USAID Indonesia. 2004. Report on Biodiversity and Tropical Forests in Indonesia Submitted in accordance with Foreign Assistance Act Sections 118/119
- Wahyuningtyas R.S. Junaidah dan Susi Andriani · 2018. *Pengolahan Sagu di Desa Pemakuan, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Inovasi Industri, Banjarbaru 19 Juli 2019. P:83-90. Baristand
- Weaver, D. 2002. Ecotourism as a Tool for Development in Peripheral Regions. Presented for The 4th International Environmental Congress of Andorra: 'Ecotourism in Mountain Areas, July 17, 2002
- Wunder, S., 2005. Payments for environmental services: some nuts and bolts. CIFOR Occasional Paper no. 42. CIFOR, Bogor, Indonesia, p. 24p.
- Wunder, S., 2015. Revisiting the concept of payments for environmental services. *Ecological Economics* 117, 234-243
- Yarisetouw, B., 2012. "Strategi Perencanaan Desa Tablanusu Distrik Depapre Sebagai Destinasi Pariwisata di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua". (Tesis). Denpasar: Universitas Udayana

.
. .
. .
. .
. .
. .